

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Catatan Pembuka**

Dalam suatu negara kritik sosial sangat dibutuhkan untuk masukan ataupun instrospeksi tentang sistem dan tatanan negara yang sedang berjalan, di sinilah peran masyarakat untuk menyuarakan kegelisahannya tentang sistem ataupun tatanan negara yang mereka rasakan dengan memberikan kritik sosial. Kritik juga dapat membuat stabilitas dalam negara serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Konflik dan kritik sosial tidak perlu dipahami sebagai tindakan yang akan membuat proses disintegrasi tetapi dapat memberi kontribusi terhadap harmonisasi sosial (Mahfud et al, 1997, p.27).

Penyampaian kritik pun bisa menggunakan berbagai cara dan media, salah satunya dengan media musik atau lagu. Lagu ini bisa digunakan sebagai media kritik sosial karena pada setiap lagu terdapat pesan yang tersirat yang berasal dari lirik pada sebuah lagu tersebut.

Pada bab pembahasan ini penulis akan melakukan analisis semiotika dengan metode Roland Barthes pada lirik lagu Efek Rumah Kaca yang berjudul Merah, Jingga, dan Kuning. Roland Barthes menjelaskan tentang analisis tanda secara denotatif dan konotatif yang kemudian menghasilkan mitos.

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tanda-tanda dan makna dibalik lirik lagu tentang apa yang direpresentasikan oleh Efek Rumah Kaca. Lagu Merah, Jingga, dan Kuning ini dipilih oleh penulis karena lagu-lagu tersebut pada setiap liriknya terdapat representasi kritik sosial.

Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu, representasi kritik sosial pada lagu Merah, representasi kritik sosial pada lagu Jingga, dan representasi kritik sosial pada lagu Kuning. Pada setiap bab terdapat penjelasan representasi kritik sosial dalam lagu milik Efek Rumah Kaca.

### **3.2. Representasi Kritik Sosial pada Lagu Merah**

Pada lagu yang berjudul Merah ini kritik sosial yang terkandung dalam lirik lagunya lebih menjurus kepada persoalan politik di Indonesia. Politik dalam bahasa Inggris, yakni *politics* yang berasal dari bahasa Yunani *politicos* (menyangkut warga negara) *polis* (kota, negara) *politeia* (kewargaan). Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan kata politik sebagai “segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. “Juga dalam arti” kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani satu masalah)”.

Politik adalah suatu strategi untuk mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Ilmu politik berbeda dengan political action. Aksi politik adalah reduksi atas ilmu politik, karena itu, aksi politik adalah tindakan yang diambil sebagai konsekuensi untuk menjalankan teori-teori politik (Jurdi, 2016, p. 1).

Pada praktiknya kegiatan berpolitik ini terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran dan manipulasi pada pelaksanaannya. Mereka para calon wakil rakyat banyak melakukan manipulasi maupun pembohongan-pembohongan publik demi memperoleh kursi kekuasaan. Fajlurrahman Jurdi mengatakan bahwa – dalam memainkan politik, para elit politik, demi mencapai hasrat kekuasaannya mereka rela menjual akidahnya, mereka yang dahulunya memiliki jenggot ketika hasrat itu terpenuhi mereka cukur habis jenggotnya, mereka patahkan tasbih-tasbih yang dahulu mereka pakai untuk bertasbih kepada Tuhan, di sini Fajlurrahman Jurdi menuduh mereka ini sebaga “pelacur agama”, politik, intelektual, demokrasi, dan sebagainya, saking mereka ini tidak lagi memiliki harga diri dan mereka dengan mudah menjual harga diri mereka dengan menggantikannya dengan kekuasaan yang hanya mereka pakai untuk memperkaya diri sendiri tanpa melihat rakyat yang memberikan kepercayaan kepada mereka, mereka hanya dapat melihat bagaimana supaya mereka cepat memiliki rumah mewah nan megah dan mereka mengabaikan amanat yang diberikan oleh rakyat sebagai penyambung lidahnya dalam memberikan aspirasi terhadap pemerintah dan seluruh kebijakannya, akan tetapi malah mereka yang menginjak dan merampas hak-hak rakyat dan mereka seakan-akan ingin menjual rakyat dan negara ini kepada Negara Asing tanpa meminta pendapat dari rakyat yang menjadi penanggung dari kebiadapan yang mereka lakukan dan ini adalah pekerjaan orang-orang yang tidak lagi memikirkan harga dirinya (Jurdi, 2016, p. 14:15).

Fenomena seperti inilah yang menjadi kegelisahan Efek Rumah Kaca dan menjadi latar belakang pembuatan lagu yang berjudul “Merah” yang dikemas

dalam lirik lagu yang sangat lugas nan puitis. Lagu ini menggambarkan kemarahan terhadap kekacauan politik dengan durasi lagu 11 menit 20 detik dan dengan tone musik yang agresif.

### **3.2.1. Denotasi**

#### **3.2.1.1. Makna denotasi bait pertama pada lagu Merah**

Bait pertama:

“Dan kita arak mereka”

“Bandit jadi panglima”

“Politik terlalu amis”

“Dan kita, teramat necis”

Makna denotasi pada lirik tersebut yaitu kata “kita” dalam lirik ini berarti dua orang atau lebih, yang arak, “arak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti berjalan bersama-sama dengan beriring-iringan, jadi kita atau dua orang atau lebih tadi mengarak mereka, “mereka” dalam KBBI berarti dia dengan yang lain atau orang-orang yang dibicarakan. “Mereka” di sini disebutkan di lirik selanjutnya yaitu bandit, “bandit” dalam KBBI berarti penjahat atau pencuri. Lalu lirik selanjutnya jadi panglima, “panglima” dalam KBBI berarti pimpinan pasukan, lalu lirik selanjutnya dikatakan politik terlalu amis, “politik” berarti suatu strategi untuk mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan (Jurdi, 2016, p. 1). Selanjutnya “terlalu” yang berarti

amat sangat, dan “amis” yang menurut KBBI adalah sesuatu yang anyir (berbau seperti ikan). Pada lirik selanjutnya tertulis “Dan kita teramat necis, “dan” merupakan kata penghubung satuan bahasa, “kita” di sini berarti kita orang pertama lalu “teramat” yang menurut KBBI berarti terlampau sangat, lalu “necis” dalam KBBI berarti bersih dan rapi (terutama tentang pakaian).

Kesimpulan pada lirik tersebut berarti terdapat dua orang atau lebih yang mengarak bandit atau penjahat yang akan dijadikan pimpinan pasukan, dan di lirik selanjutnya disebutkan bahwa politik amat sangat amis yang berarti politik diibaratkan berbau seperti ikan atau anyir. Lalu selanjutnya kita atau beberapa orang tadi amat sangat necis atau tetap rapi.

### **3.2.2. Konotasi**

#### **3.2.2.1. Makna konotasi bait pertama pada lagu Merah**

Maka makna konotasi dari lirik lagu tersebut yaitu dua orang atau lebih tadi adalah simpatisan organisasi politik yang berjalan beriringan atau mengarak bandit berarti penjahat atau orang jahat yang bisa disebut juga calon pemimpin dari sebuah organisasi politik yang wataknya seperti penjahat yang akan dijadikan panglima atau bisa disebut pimpinan, dalam konteks ini adalah pimpinan organisasi politik. Pada lirik lagu tersebut terdapat representasi kritik sosial tentang fenomena saat ini tentang banyaknya pimpinan organisasi politik seperti bandit atau penjahat yang memiliki watak pencuri atau dalam hal ini koruptor yang digadang-gadang menjadi pemimpin masyarakat. Lalu pada lirik selanjutnya tertulis politik terlalu amis, dan kita teramat necis, yang memiliki makna konotasi

dunia politik saat ini sangatlah busuk dengan diwakilkan oleh kata amis atau bau anyir yang menjurus busuk, seperti halnya dunia perpolitikan saat ini yang banyak hal-hal tidak wajar untuk sekelas wakil rakyat, namun mereka tetap melakukannya.

Dan lirik selanjutnya yaitu “dan kita teramat necis”, kita di sini bisa saja simpatisan dari partai tersebut ataupun masyarakat umum, yang tetap tenang-tenang saja melihat gejala politik yang busuk tersebut diwakilkan oleh kata necis yang berarti rapi atau tetap bersih, seolah-olah tidak ada kejadian yang sedang serius terjadi di dunia perpolitikan Indonesia, pada lirik di baris ini terdapat representasi kritik sosial terhadap masyarakat umum atau penegak hukum yang kurang adanya tindakan yang serius untuk menangani kasus-kasus pelanggaran dalam dunia politik di Indonesia.

Pada setiap gugusan masyarakat yang membentuk suatu tata pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari aspek politik ini. Politik sebagaimana kita ketahui bersama terdiri dari orang-orang yang berperilaku dan bertindak politik (*consists of people acting politically*) yang diorganisasikan secara politik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan dan tindakan yang bisa mengangkat kepentingannya dan mengenyampingkan kepentingan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat itu mempunyai kepentingan yang diperjuangkan agar pemerintah terpengaruh. Birokrasi pemerintah langsung ataupun tidak langsung akan selalu berhubungan dengan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.

Penguasa pemerintah di hampir setiap negara percaya bahwa tugas utama dari setiap pemerintahan apakah demokratis atau otoritarian adalah untuk menjamin agar negara dan bangsanya tetap hidup dan berjaya. Kejayaan dan kehidupan suatu negara mencakup dua tugas fundamental yang harus tetap dijalankan. Dua tugas fundamental itu antara lain: mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman musuh dari luar, dan kedua mengendalikan dan mengelola konflik internal agar tidak berlarut-larut menjadi perang saudara (Thoha, 2003, p. 27).

Dan pada sistem yang ada di Indonesia pemilihan wakil rakyat yang kelak ditugaskan di dalam sistem pemerintahan dipilih dengan cara pemilu atau pemilihan umum. Dapat dipastikan bahwa semua pihak yang terlibat dengan proses pemilihan umum percaya bahwa Pemilu adalah lembaga dan proses politik demokrasi. Fungsinya mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintahan perwakilan. Operasionalisasinya bekerja untuk memilih atau menentukan wakil rakyat yang akan menduduki posisi pemerintahan. Akan tetapi cita-cita tentang fungsi Pemilu yang mulia ternyata tidak sepenuhnya dicapai dengan cara yang mulia dan ternyata tidak seharusnya dicapai dengan cara yang setara mulianya (Sanit, 1997, p. 85).

Banyak pejabat Indonesia yang saat ini berwatak seperti penjahat ataupun pencuri, bahkan barang curian yang diambil lebih banyak dari penjahat biasa, namun mirisnya malah tetap digadang-gadang untuk menjadi pimpinan di dalam birokrasi pemerintahan Indonesia, kasus korupsi tak henti-hentinya terjadi di birokrasi kita, dari yang recehan sampai milyaran. Aktifitas politik Indonesia

sangatlah busuk dan sangat tidak masuk akal untuk konteks politik yang sebenarnya. Karena aktifitas politik Indonesia hanya melakukan pengkhianatan terhadap elit politik yang lain, sehingga membuat pentas politik Indonesia ini menjadi semacam apa yang dikatakan oleh Frans Magnis Suseno *“Politik sering dianggap “bisnis” yang kotor, mencari politisi yang sungguh-sungguh jujur dan “sepi ing pamrih”*. *Di anggap sama sama dengan mau mencari perawan dilokasi pelacuran, itulah pendapat sinisme pragmatis. Sedangkan strukturalisme ekstrem berpendapat bahwa moralitas pribadi politisi tidak relevan, bahwa sebuah negara hanya dapat maju apabila para politisi yang memimpinya memiliki integritas dan kejujuran pribadi*. Inilah realitas politik yang sedang terjadi pada saat sekarang. Elit politik itu sangat busuk dengan berbagai aktifitas busuknya yang tidak pernah dewasa untuk memperbaiki konteks politik (Jurdi, 2016, p. 43).

### **3.2.1.2. Makna denotasi bait kedua pada lagu Merah**

Bait kedua:

“Lalu angkat mereka”

“Sampah jadi pemuka”

“Politik terlalu najis”

“Dan kita teramat klinis”

Makna denotasi pada lirik tersebut yaitu “lalu” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah berjalan lewat, dan arti “angkat” dalam KBBI adalah naikkan atau tinggikan, lalu “mereka” berarti dia dengan yang lain

atau orang-orang yang dibicarakan. Pada baris kedua terdapat kata “sampah” yang dalam KBBI berarti barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi, dan selanjutnya terdapat kata “jadi” yang menurut KBBI langsung berlaku (dilakukan, dikerjakan) dan kata “pemuka” menurut KBBI ialah orang yang menjadi pemimpin atau penganjur. Selanjutnya pada baris ketiga terdapat kata “politik”, peneliti menggunakan definisi dari Jurdi yang berarti suatu strategi untuk mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan (Jurdi, 2016, p. 1), selanjutnya “terlalu” yang berarti amat sangat dan kata berikutnya adalah “najis” yang pada KBBI berarti kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Di bait selanjutnya ada kata “dan” merupakan kata hubung, “kita” di sini berarti kita orang pertama lalu teramat yang menurut KBBI berarti terlampaui sangat, dan arti “klinis” adalah rapi dan bersih (tentang pakaian, dandanan).

Kesimpulan makna denotasi pada lirik tersebut berarti mereka yaitu beberapa orang yang diangkat atau dinaikkan derajatnya, dijelaskan pada baris selanjutnya yaitu sampah atau barang yang sudah dibuang dan tidak terpakai akan dijadikan pemuka atau pemimpin oleh sekumpulan orang. Lalu pada baris selanjutnya dikatakan politik yang terlalu najis, najis berarti sangat kotor, dan ditutup pada baris keempat disebutkan sekumpulan orang tadi teramat klinis atau sangat rapi dan bersih walaupun sesuatu yang kotor sedang terjadi.

### **3.2.2.2. Makna konotasi bait kedua pada lagu Merah**

Maka makna konotasi dari lirik tersebut yaitu “lalu” yang berarti setelahnya, jadi lirik tersebut berkesinambungan dengan lirik pada bait pertama, “kita” atau beberapa orang tadi lalu angkat atau mengangkat bisa disebut mencalonkan mereka lalu disebutkan mereka tersebut di baris selanjutnya yaitu sampah, kenapa disebut sampah pada lirik tersebut karena beberapa calon dari sebuah organisasi politik adalah orang-orang yang kotor dalam arti kotor jiwanya bukan kotor secara fisik, lalu akan dijadikan pemuka atau pimpinan oleh simpatisan organisasi politik tadi. Pada lirik tersebut terdapat representasi kritik sosial tentang keadaan perpolitikan saat ini yang kurang teliti saat mencari kader pada organisasi politiknya, alhasil pada pelaksanaannya kader-kader organisasi politik tadi mengingkari janjinya.

Dan pada baris ketiga dan keempat bermakna konotasi dunia politik Indonesia terlalu atau sangat kotor, sehingga pada lirik tersebut dituliskan dengan kata najis, lalu pada bait selanjutnya bermakna konotasi dengan keadaan politik yang seperti itu, namun kita sebagai simpatisan ataupun masyarakat umum tetap tenang atau tidak ada perlawanan disebutkan dengan kita teramat klinis, seolah-olah tidak ada masalah terjadi di dunia perpolitikan Indonesia. Pada lirik ini terdapat representasi kritik sosial yang diungkapkan oleh Efek Rumah Kaca jangan diam saja melihat persoalan yang runyam ini, setidaknya bersuara dengan kritik dengan media apapun yang bisa didengar oleh wakil rakyat kita.

Postur pemerintahan yang sekarang adalah terlampau mementingkan kekuasaan, tidak begitu memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Sebaliknya, kepentingan kelompok kecil yang berada di sekitar kekuasaan merupakan sesuatu yang menjadi perhatian utama. Apa yang disebut dengan *cronysm* dengan implikasi korupsi, kolusi, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya, merupakan kenyataan yang tidak dapat dinaifkan. Itulah postur pemerintah sekarang.

Oleh karena itu, postur pemerintah yang diharapkan sebagai hasil dari reformasi ini adalah sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sebuah pemerintahan yang demokratis, yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita keadilan sosial di masa-masa mendatang. Dengan demokrasi, pemerintahan yang bersih dan berwibawa dapat diwujudkan. Dengan demokrasi, akan mempercepat proses peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat, karena kontrol terhadap kekuasaan pemerintah dapat diwujudkan (Gaffar, 1999, p. 163:164).

Bagi kalangan yang melihat bahwa mekanisme yang ada sekarang ini sudah mampu menciptakan suatu sistem politik yang stabil serta telah memperlihatkan daya tahan yang sangat baik untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, terlebih lagi mereka yang, baik secara langsung maupun tidak, telah memperoleh manfaat sosial-ekonomis dan politik, tentu saja akan merasa bahwa kondisi dan mekanisme seperti sekarang inilah yang terbaik.

Namun, bagi mereka yang mempunyai pandangan bahwa, bagaimanapun juga, kekuasaan harus dibatasi agar tidak menimbulkan hal-hal negatif, seperti

penyalahgunaan kekuasaan, otoritarianisme, korupsi, dan lain sebagainya, sudah saatnya kita mengadakan peninjauan kembali terhadap mekanisme kekuasaan (Gaffar, 1999, p. 87).

Beberapa kutipan diatas didukung oleh kasus-kasus yang terkekspos oleh media massa salah satunya kasus Setya Novanto yang belakangan ini ramai kembali dibicarakan oleh masyarakat umum di Indonesia, beliau terkenal licin atau pasti lolos jika terkena kasus korupsi ataupun suap, saat ini beliau menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, seperti yang dimuat oleh Tempo Selasa, 17 November 2015 tentang beberapa kasus Setya Novanto berikut, pada tahun 1999 terkena kasus pengalihan hak tagih, pada tahun 2003 kasus penyelundupan beras dari Vietnam sebanuak 60 ribu ton, tahun 2006 kasus penyelundupan limbah beracun (B-3) di pulau Galang, Batam, tahun 2012 kasus korupsi proyek PON Riau 2012, dan pada tahun 2013 kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP (<https://nasional.tempo.co/read/719654/5-kasus-yang-membelit-setya-novanto> diakses pada tanggal 14 oktober 2017 jam 7:51).

Dengan bukti-bukti tersebutlah bisa dikatakan bahwa dunia politik di Indonesia “sedang tidak baik-baik saja”. Dan memunculkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat mereka.

### **3.2.3.1 Mitos pada bait pertama dan kedua lagu Merah**

Mitos ini tidak dipahami sebagaimana pengertian klasiknya, tetapi lebih diletakkan dalam proses penandaan itu sendiri. Artinya tetap dalam diskursus semiologinya itu. Mitos menurut Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan,

jadi setelah terbentuk sistem tanda-penanda-petanda; tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Konstruksi penandaan pertama adalah bahasa, sedang konstruksi penandaan kedua merupakan mitos. Konstruksi penandaan tingkat kedua ini dipahami Barthes sebagai metabahasa (*metalanguage*) (Kurniawan, 2001, p. 22).

Dari lirik pada bait ini terdapat representasi kritik sosial mengenai dunia perpolitikan di Indonesia yang memprihatinkan, dengan lirik lagu yang menggunakan bahasa kiasan namun tajam. Dari makna denotasi dan konotasi yang dipaparkan di atas mengenai representasi kritik sosial menghasilkan mitos bahwa dunia politik Indonesia saat ini sangatlah buruk, masih banyak yang perlu diperbaiki dari calon wakil rakyatnya sampai sistem politik yang berlaku di Indonesia saat ini.

### **3.2.1.3. Makna denotasi bait ketiga pada lagu Merah**

Bait ketiga:

“Sampai kapan kau biarkan”

“Dia tak berperan”

“Ditelantarkan harapan, dia kesakitan”

“Terburai berantakan, tak keruan”

“Marah di mana mana”

Makna denotasi pada lirik lagu tersebut yaitu kata “sampai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti mencapai (datang atau tiba), lalu kata “kapan” berarti ungkapan tanya tentang waktu, lalu “kau” kata dasar dari engkau bisa berarti kamu, kata “biarkan” memiliki kata dasar “biar” atau supaya (kata penghubung untuk menyatakan hal-hal yang tidak bersyarat. Pada baris kedua terdapat kata “dia” yang dalam KBBI berarti persona tunggal yang dibicarakan di luar pembicara dan lawan bicara. Lalu “tak” yang bisa berarti tidak dan “berperan” yang dalam KBBI berarti bermain sebagai. Dan pada baris ketiga terdapat kata “ditelantarkan” pada KBBI terlantar berarti tidak terpelihara lalu mendapat kata imbuhan di- dan -kan yang bisa dimaksudkan sengaja tidak terpelihara lalu disambung dengan “harapan” yang pada KBBI berarti sesuatu yang dapat diharapkan, dan kata “dia” lagi yang dalam KBBI berarti persona tunggal yang dibicarakan di luar pembicara dan lawan bicara, disambung dengan kesakitan yang dalam KBBI berarti terasa sakit atau menderita.

Lalu pada baris keempat terdapat awalan kata “terburai” yang dalam KBBI berarti keluar berantakan, dan disambung dengan “berantakan” yang berarti cerai berai (berserak-serak), dan dilanjutkan dengan “tak keruan” yang berarti tidak pasti atau tidak tentu. Lalu pada baris kelima terdapat kata “marah” yang dalam KBBI berarti sangat tidak senang (karena dihina, diperlakukan tidak sepatutnya), dan ditutup dengan sambung “di mana-mana” yang berarti di mana pun.

Lalu kesimpulan pada lirik tersebut yaitu terdapat orang bertanya sampai kapan kau, kau disini berarti orang lain, dia atau seseorang lainnya lagi tidak diberi peran. Lalu pada baris selanjutnya ditelantarkan harapan yaitu sengaja dibiarkan

oleh sebuah harapan atau sesuatu yang diharapkan, lalu dia kesakitan, berarti seseorang yang merasa sakit, lalu dilanjutkan pada baris keempat dengan terburai berantakan berarti ada sesuatu yang keluar berantakan tidak teratur. Dan ditutup di baris ke lima terdapat kemarahan di mana-mana.

### **3.2.2.3. Makna konotasi bait ketiga pada lagu Merah**

Jadi makna konotasi dalam lirik lagu tersebut yaitu terdapat sebuah pertanyaan “sampai kapan kau biarkan dia tak berperan?” pada lirik tersebut ada seseorang yang bertanya kepada elite politik tentang ketidakperannya “dia”, dia di sini adalah masyarakat umum yang kurang mendapat peran atau dibiarkan ketika mereka para pengumbar janji saat pemilu menang dan lupa kepada masyarakat yang mendukungnya. Masyarakat tak pernah diajak untuk menentukan kebijakan, mereka para elite politik membuat kebijakan dengan semena-mena tanpa saran dari masyarakatnya padahal tahta tertinggi di tangan rakyat. Pada baris pertama dan kedua terdapat representasi kritik sosial tentang ketidakterlibatannya masyarakat saat mengambil keputusan, seharusnya terdapat perwakilan dari masyarakat umum saat pengambilan keputusan ataupun pembuatan kebijakan baru.

Lalu makna konotasi pada lirik “ditelantarkan harapan, dia kesakitan, terburai berantakan, tak keruan” yaitu yang dimaksud ditelantarkan adalah masyarakat umum, yang ditelantarkan oleh harapan-harapan atau keinginan mereka yang mereka inginkan dari pemerintah yang memberi harapan palsu, masyarakat lalu merasa tersakiti akan harapan yang yang seharusnya terwujud itu

sirna, tidak jelas arahnya, lalu dijelaskan pada lirik selanjutnya yaitu “marah di mana-mana” harapan-harapan yang tidak terwujud tadi menjadi *trigger* bagi masyarakat yang kecewa, mereka marah, dengan cara penyampaian kritik, ada yang dengan cara damai namun ada pula yang menggunakan cara anarkis. Pada lirik tersebut terdapat representasi kritik sosial tentang pengingkaran janji-janji manis dari elite politik kepada masyarakat, mereka para elite politik saat kampanye berjanji akan membuat lebih sejahtera negara ini, masyarakat sudah berharap, namun harapan-harapan itu pupus karena hanya sekedar harapan palsu.

Untuk terwujudnya masyarakat madani di Indonesia seharusnya pemerintah harus tetap mengontrol suhu demokrasi, jangan hanya condong ke pemerintah pusat saja, namun harus melibatkan masyarakat umum juga, paling tidak terdapat perwakilan yang netral dan tidak berkepentingan politik. Budaya politik yang demokratik ini menyangkut “*suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi,*” kata Almond dan Verba. Keyakinan akan kemampuan seseorang merupakan kunci bagi terbentuk dan terpeliharanya demokrasi. Jadi, kompetensi merupakan kata kunci. Artinya, warga negara mempunyai keyakinan bahwa mereka memiliki kompetensi untuk terlibat dalam proses politik yang berjalan.

Konsekuensi selanjutnya adalah, kalangan pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang memperhatikan warga masyarakat. Kalau tidak demikian, warga masyarakat akan mengalami *desprivasi*, sehingga mereka menjadi kecewa dan meninggalkan pemerintah. Pada pemilihan yang akan datang, mereka tidak akan memilih pemimpin yang meninggalkan mereka. Sebaliknya, kalau warga

masyarakat tidak merasa kompeten untuk terlibat dalam proses politik, implikasinya adalah peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara menjadi sangat dominan. Rakyat menjadi sasaran dan objek kebijaksanaan pemerintah yang dapat dimanipulasi untuk kepentingan pemerintah. Di sinilah salah satu sumber utama bagi terbentuknya sebuah budaya politik yang demokratis, yaitu *civic culture* (Gaffar, 1999, p. 101).

Thoha menambahkan (2003, p. 56) *bekerja dalam negara yang demokratis* (*Working in democratic state*) merupakan cita-cita semua orang yang mau hidup di negara yang demokratis. Selama ini kita belum merasakan hal seperti itu. Sekarang pemerintah berkeinginan mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi disegala bidang. Prinsip demokrasi yang paling penting ialah meletakkan kekuasaan itu ditangan rakyat, bukannya ditangan penguasa. Sementara itu tidak adanya rasa takut untuk memasuki suatu serikat atau perkumpulan yang sesuai dengan hati nurani dan kebutuhannya. Selaras dengan tidak adanya rasa takut ini, juga dikembangkan adanya kenyataan dihargainya moral *perbedaan pendapat*.

Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis juga perlu sosialisasi politik juga. Proses pembentukan budaya politik dilakukan melalui apa yang disebut sebagai *sosialisasi politik*. Yaitu, proses penerusan atau pewarisan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sistem, nilai, norma dan keyakinan yang dimiliki oleh sebuah generasi dapat diturunkan kepada generasi berikutnya melalui berbagai media, seperti: keluarga, sanak-saudara, kelompok bermain, sekolah (mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi). Kemudian, setelah selsesai pendidikan, diteruskan melalui lingkungan kerja dan ditopang

oleh media yang lain, seperti: koran, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya. Apa yang dikemukakan tersebut merupakan *agent* dari sosialisasi politik (Gaffar, 1999, p. 102:103).

Proses sosialisasi atau pendidikan politik di Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan *civil society*. Yaitu, suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik, sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebih-lebihan. Ada tiga alasan utama mengapa pendidikan politik di Indonesia tidak memberi peluang yang cukup untuk memunculkan *civil society*.

*Pertama*, dalam masyarakat kita, anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan yang mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan tentang nasib si anak, merupakan domain orang dewasa; anak-anak tidak dilibatkan sama sekali.

*Kedua*, tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah. Kalangan keluarga miskin, petani, buruh, dan lain sebagainya, tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena mereka lebih terpaku pada kehidupan ekonomi daripada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik. Bagi mereka, ikut terlibat dalam wacana publik tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, hak-hak asasi manusia dan sejenisnya, bukanlah skala prioritas yang penting.

*Ketiga*, setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam hal pendidikan politik. Jika kita amati, pendidikan politik Indonesia lebih merupakan sebuah proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh penguasa negara.

Uraian di atas memberikan gambaran yang cukup pesimistis tentang budaya politik Indonesia. Dengan budaya politik yang diwarnai pola hubungan yang sangat hierarkis, kecenderungan *patronage* politik yang kuat, serta gejala *neo-patrimonialisme*, kita tidak dapat berharap banyak akan munculnya proses demokratisasi yang kuat dan meluas.

Pesimisme kita akan semakin menguat ketika kita melihat proses sosialisasi dalam lingkungan keluarga di Indonesia, yang tidak menciptakan individu yang mandiri, ditambah lagi dengan tingkat politisi masyarakat kalangan bawah yang masih sangat rendah. Oleh karena itu, sosialisasi politik di Indonesia belum memberikan ruang yang cukup untuk sebuah *civil society* (Gaffar, 1999, p. 118-121).

Pada dasarnya, kebijaksanaan publik adalah proses penentuan pengambilan keputusan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Secara politik, kebijaksanaan publik merupakan proses penentuan alokasi untuk menentukan siapa yang memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Di Indonesia, kebijaksanaan publik merupakan domain kalangan sekelompok kecil elite yang ada di Jakarta. Sementara itu, kalangan masyarakat

kebanyakan tidak terlibat sama sekali, sekalipun hal itu menyangkut nasib dan kepentingan kalangan masyarakat kebanyakan tersebut. Akibatnya, tidak jarang lahir sejumlah kebijaksanaan yang sifatnya sangat kontroversial.

Proses pembuatan kebijaksanaan publik yang seperti itu memiliki tingkat akuntabilitas yang rendah sekali. Sehingga tidaklah mengherankan kalau banyak sekali kebijaksanaan pemerintah yang mendapat resistensi dari kalangan masyarakat, karena tidak sesuai dengan aspirasi dengan aspirasi mereka. Kalau sudah sampai pada kenyataan seperti itu, biasanya, pemerintah lebih menekankan kepada pendekatan yang bersifat kekuasaan. Jarang sekali pemerintah mau memodifikasi kebijaksanaan, sekalipun hal itu mendapat tantangan yang sangat kuat dari masyarakat (Gaffar, 1999, p. 158-160).

### **3.2.3.2 Mitos pada bait ketiga lagu Merah**

Dari lirik pada bait ketiga ini terdapat representasi kritik sosial mengenai ketidakperannya masyarakat dalam dunia perpolitikan yang berjalan, dan tentang janji-janji saat kampanye yang diharapkan masyarakat namun tak kunjung direalisasikan bahkan mungkin dilupakan. Dari makna denotasi dan konotasi yang dipaparkan di atas mengenai representasi kritik sosial menghasilkan mitos bahwa elite politik saat ini hanyalah mengumbar janji-janji palsu semata, jarang ada elite yang politik yang menepati janjinya saat kampanye, hanya beberapa saja yang bisa menepati janji yang diharapkan oleh masyarakat.

#### 3.2.1.4. Makna denotasi bait keempat pada lagu Merah

Bait keempat:

”Moralis, merasa paling baik”

“Macam yang paling etis, awas jatuh menukik”

“Sang martir, inginnya adu fisik”

“Cupet dan sesat pikir, buah intrik politik”

Makna denotasi pada lirik tersebut yaitu kata “moralis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang terlalu mementingkan moral, lalu selanjutnya “merasa” yang berarti tanggapan indra terhadap rangsangan saraf, “paling” yang berarti merasa lebih atau teramat, lalu “baik” yang dalam KBBI berarti elok, patut, teratur (apik, rapi, tidak ada celahnya). Lalu pada baris kedua terdapat kata “macam” yang berarti jenis atau rupa, “yang paling etis” berarti teramat atau paling “etis” berarti sesuai dengan etika.

Lalu dilanjutkan dengan “awas” yaitu sebuah peringatan “jatuh” yang dalam KBBI berarti turun atau meluncur ke bawah, lalu “menukik” yang berarti terbang lalu ke arah bawah. Dan pada baris ketiga terdapat kata “sang” yang berarti kata yang dipakai di depan nama orang atau binatang atau benda yang dianggap hidup/dimuliakan selanjutnya adalah kata “martir” yang dalam KBBI berarti orang yang rela menderita atau mati daripada menyerah karena mempertahankan agama atau kepercayaan, lalu disusul dengan kata “inginnya” yang mempunyai kata dasar ingin yang berarti hendak, mau atau berhasrat dan

selanjutnya terdapat kata “adu” yang berarti berlanggaran atau bertumbukkan dan “fisik” yaitu jasmani atau badan.

Dan pada penutup bait yaitu baris keempat diawali dengan kata “cupet” yang berarti kurang mencukupi lalu diberi kata hubung “dan” menunjukkan tak hanya satu, lalu dilanjutkan dengan kata “sesat” didalam KBBI berarti tidak melalui jalan yang benar dan kata “pikir” yang berarti akal budi. Lalu pada penutup bait terdapat kata “buah” yang berarti bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik disambung dengan “intrik” yang dalam KBBI berarti penyebaran kabar bohong yang sengaja untuk menjatuhkan lawan dan diakhiri dengan kata “politik” yang berarti suatu strategi untuk mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan (Jurdi, 2016, p. 1).

Jadi kesimpulannya adalah terdapat orang yang terlalu mementingkan moral dan dia merasa paling baik, dan merasa paling benar atau sesuai dengan etika, dan diperingatkan awas nanti bisa jatuh menukik yang berarti jatuh yang sangat sakit karena meluncur ke atas dulu baru terjatuh ke bawah. Lalu terdapat seorang martir atau orang yang rela menderita atau mati daripada menyerah karena mempertahankan agama atau kepercayaan yang inginnya adu fisik yaitu bisa berarti bentrok secara langsung atau bersentuhan badan. Dan pada baris terakhir akibat penyebaran berita bohong tentang politik lalu ada seseorang yang cupet atau kurang tau dan salah jalan pikirannya atau bisa dibilang menjadi bodoh.

#### **3.2.2.4. Makna konotasi bait keempat pada lagu Merah**

Makna konotasi pada lirik tersebut yaitu saat ini telah banyak orang-orang yang merasa paling baik dengan mengandalkan jabatannya, mereka merasa paling bisa untuk dicontoh dibanding masyarakat pada umumnya. Lalu pada lirik selanjutnya dituliskan terdapat “sang martir” atau orang-orang yang rela mati-matian mempertahankan keyakinan atau organisasi politiknya, seperti halnya partai-partai yang berbasis agama dengan anggota-anggotanya yang sangat gampang terpicu kemarahan dengan adu fisik dengan kata lain bentrokan. Kebanyakan mereka lebih memilih menggunakan otot dari pada menggunakan akal pikirannya, hal-hal itu semua terjadi akibat sering terjadinya kabar-kabar burung yang mengadu domba organisasi satu dengan yang lain yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik.

Pada lirik tersebut terdapat representasi kritik sosial yang menonjol tentang banyaknya elite-elite politik yang merasa paling benar, tidak mau mengalah. Lalu dilanjutkan dengan para anggota-anggotanya yang gampang sekali terpancing emosi, entah karena intrik atau kabar tidak benar berkaitan dengan politik yang menyangkut organisasi politiknya ataupun masalah lainnya.

Semakin tinggi *layer* atau lapis hierarki jabatan seseorang dalam birokrasi maka semakin besar kekuasaannya, dan semakin rendah lapis hierarkinya semakin tidak berdaya (*powerless*). Adapun yang berada di luar lapis-lapis hierarki (*beyond the hierarchy*) adalah rakyat yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi kekuasaan birokrasi.

Korelasi ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan pada hierarki atas sangat tidak imbang dengan penggunaan kekuasaan di tingkat bawah. Dengan kata lain sentralisasi kekuasaan yang berada di tingkat hierarki atas semakin memperlemah posisi pejabat di hierarki bawah dan tidak memberdayakan rakyat yang berada di luar hierarki. Sekaligus korelasi semacam ini mengartikan bahwa hierarki bawah dianggap kurang mampu mengatasi segala urusan, atau hierarki bawah tidak berani melakukan tindakan kalau tidak sepengetahuan hierarki atas. Anggapan seperti inilah yang membuat birokrasi pemerintah sangat tergantung pada seseorang yang amat berkuasa. Sekali lagi sentralisasi kekuasaan sangat kuat. Di sini pula dapat membenarkan sebutan birokrasi pemerintah sebagai kerajaan pejabat seperti yang telah disinggung (Thoha, 2003, p. 11:12).

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi. Sebagian dari perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik.

Pada sebuah sistem politik memiliki perannya masing-masing dan memiliki efeknya pula. Ada pihak yang memerintah, ada pula yang mentaati pemerintah; yang satu memengaruhi, yang lain menentang, dan hasilnya berkompromi; yang satu menjanjikan, yang lain kecewa karena janji tidak

dipenuhi; berunding dan tawar menawar; yang satu memaksakan putusan berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat yang berusaha membebaskan; yang satu menutupi kenyataan yang sebenarnya (yang merugikan masyarakat atau yang akan mempermalukan) pihak lain berupaya memaparkan kenyataan yang sesungguhnya; dan mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang akan terjadi. Semua ini merupakan perilaku politik (Surbakti, 1992, p. 15:16).

Ironisnya pada setiap hal yang dilakukan pemerintah terdapat elite-elite politik yang maunya menang sendiri, akibatnya sering timbul konflik, mereka merasa paling benar dengan keputusannya. Dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik terjadi sejumlah konflik, konsensus, dan perubahan. Di dalam hampir setiap proses politik selalu berlangsung konflik antara pihak-pihak yang berupaya mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber yang dipandang penting dan pihak-pihak lain yang juga berikhtiar mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber tersebut.

Dalam proses politik berbagai kelompok dan individu dengan menggunakan sarana kekuasaan yang dimiliki berupaya keras memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya kepada pemerintah sehingga menjadi bagian dari keputusan politik. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain (Surbakti, 1992, p. 18).

Di antara lima tahapan Pemilu yang paling menarik perhatian masyarakat luas yaitu pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyerahan suara, dan perhitungan suara, ternyata kampanye adalah yang paling terbuka bagi terjadinya kekerasan fisik. Sebab utamanya ialah adanya keterlibatan masyarakat luas secara fisik. Berlangsungnya kompetisi terbuka di antara kontestan bersama para pendukungnya, dan terjadinya tingkah laku politik massal yang menghendaki kemampuan pengelola lapangan serta disiplin tinggi. Bagi situasi Indonesia, pilihan kampanye massal masih merupakan terbaik dilihat dari kepentingan kontestan dan masyarakat luas, sebab lembaga lain seperti media massa, konvensi partai dan hubungan pribadi (dari pintu ke pintu) belum dikembangkan secara sistematis. Lagipula, tahap pendaftaran, pencalonan, dan perhitungan suara lebih berproses secara administratif. Sedangkan penyerahan suara yang juga dihadiri oleh massa terkontrol oleh pemberlakuan prosedur yang terinci dan baku serta diamankan secara ketat (Sanit, 1997, p. 87:88). Tahap kampanye inilah yang sering digunakan para simpatisan bak “Sang martir”, yang hanya ingin beradu fisik tanpa kompromi ataupun musyawarah.

Secara umum masyarakat yang terlibat di dalam kekerasan politik dalam pemilu dilatari oleh tekanan kehidupan, terbaikannya peran lembaga politik, dan tingkat perkembangan sosial-ekonomi yang belum memadai. Tekanan kehidupan berupa persaingan lapangan kerja, produksi dan pemasaran yang semakin sengit melatukkan warga masyarakat dalam posisi sulit. Di satu pihak perkembangan pendidikan dan informasi melahirkan aspirasi baru berupa kehidupan yang lebih baik, partisipasi yang lebih luas, dan kebebasan pribadi dan keluarga yang

semakin mendalam. Di lain pihak, kondisi riil ekonomi mereka tidak menunjang realisasi bagi aspirasi yang berkembang tersebut.

Maka pada saat juru kampanye menawarkan perubahan dan perbaikan sistem ekonomi dan kekuasaan lewat isu pemerataan, keadilan, kebebasan, pemerintah yang bersih, warga masyarakat tersebut menjadi hanyut dalam emosi ketidakpuasan yang diharapkan terselesaikan melalui gagasan yang ditawarkan oleh juru kampanye. Maka pihak yang diidentifikasi sebagai penghambat bagi realisasi gagasan dipandang dan diperlakukan sebagai lawan yang perlu diberi pelajaran karena menghalangi pembenaran dan realisasi harapannya (Sanit, 1997, p. 92:93).

Analisa tentang perkembangan dan penyebab terjadinya kekerasan politik di atas menunjukkan adanya dua kelompok penyebab yaitu penyebab teknis dan penyebab mendasar. Secara teknis pelaksanaan Pemilu yang berkaitan dengan kampanye ternyata mendominasi terjadinya kekerasan politik. Dalam kaitan itu aspek kegiatan kampanye seperti pertemuan massal secara terbuka, pilihan isu, penggunaan bahasa, gaya kampanye, berperan sebagai pemicu kekerasan politik. Dan secara prinsipil, tekanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dirasakan oleh kelompok masyarakat, tak berprosesnya Pemilu sebagai suatu lembaga politik yang dihormati dan dimanfaatkan secara optimal, dan terjadinya berbagai kesenjangan sosial-ekonomi-politik, adalah akar dari kekerasan politik dalam Pemilu (Sanit, 1997, p. 94).

### **3.2.3.3 Mitos pada bait keempat lagu Merah**

Dari lirik pada bait keempat ini terdapat representasi kritik sosial yang menonjol tentang banyaknya elite-elite politik yang merasa paling benar, tidak mau mengalah. Lalu dilanjutkan dengan para anggota-anggotanya yang gampang sekali terpancing emosi, entah karena intrik atau kabar tidak benar berkaitan dengan politik yang menyangkut organisasi politiknya ataupun masalah lainnya. Dari makna denotasi dan konotasi yang dipaparkan di atas mengenai representasi kritik sosial menghasilkan mitos bahwa para elite politik banyak yang merasa paling benar, padahal masih banyak hal yang perlu diperbaiki darinya. Lalu juga pada lirik selanjutnya terdapat mitos bahwa orang-orang yang berjuang demi kepercayaan ataupun organisasinya banyak yang bertindak brutal, karena adu domba dari pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun karena masalah politik.

### **3.3. Representasi Kritik Sosial pada Lagu Jingga**

Pada lagu kedua yang menjadi penelitian penulis adalah lagu yang berjudul Jingga, pada lagu Jingga ini terkandung representasi kritik sosial tentang persoalan pelanggaran HAM atau Hak Asasi Manusia di Indonesia pada kurun waktu tahun 1997-1998, pelanggaran HAM pada kasus ini adalah tentang penculikan dan penghilangan aktivis.

Pengertian HAM seperti yang dikemukakan oleh Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha

Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah *hak persamaan dan hak kebebasan*. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan (Lopa, 1996, p. 1:2).

HAM adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan; sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.

Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya, di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia, apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma (Muhtaj, 2015, p. 43:44).

Satya Arnianto (dalam pengantar Muhtaj, p. xi) mengatakan Berbagai perkembangan di dunia internasional dalam bidang HAM juga memiliki pengaruh yang signifikan di Indonesia. Pada saat-saat ini bangsa Indonesia sedang berada dalam masa transisi politik menuju demokrasi. Salah satu hal yang harus dituntaskan dalam masa transisi politik tersebut adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu

Pada praktiknya di Indonesia kasus pelanggaran HAM masih banyak terjadi, dan masih banyak pula kasus HAM juga yang belum tuntas diselesaikan. Hingga saat ini tidak terdapat pengertian tunggal mengenai konsep pelanggaran HAM, sekalipun di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum bahwa pelanggaran HAM dimaknai sebagai “pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional HAM”. Pelanggaran terhadap kewajiban negara itu dapat dilakukan dengan perbuatannya sendiri (*act of omission*). Dalam rumusan lain, pelanggaran HAM adalah “tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional, tetapi merupakan norma HAM yang diakui secara internasional (Marzuki, 2012, p. 38).

Maka pada lagu yang berjudul “Jingga” inilah Efek Rumah Kaca membuat lirik lagu tenang desakan pengusutan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia khususnya pada kasus-kasus penghilangan orang yang terjadi pada kurun waktu 1997-1998.

### **3.3.1. Denotasi**

#### **3.3.1.1. Makna denotasi bait pertama pada lagu Jingga**

Bait pertama:

“Rindu kami seteguh besi”

“Hari demi hari menanti”

“Tekad kami segunung tinggi”

“Takut siapa? semua hadapi”

Makna denotasi pada lirik lagu “Jingga” diawali dengan kata “rindu” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu atau memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu lalu disambung dengan kata “kami” yang berarti kata ganti orang pertama jamak atau tunggal yang bersifat menunjukkan kehormatan si pembicara. Lalu ada kata “seteguh” yang dalam KBBI berarti sekuat dan disambung dengan kata “besi” yang berarti logam yang keras dan kuat. Lalu pada baris kedua dimulai dengan kata “hari” yang berarti waktu dalam kurun waktu 24 jam, lalu disambung dengan kata “demi” yang berarti lepas satu persatu dan selanjutnya terdapat kata “hari” lagi seperti awal tadi dan disambung dengan kata “menanti” yang berarti menunggu.

Lalu pada baris ketiga diawali dengan kata “tekad” yang dalam KBBI berarti kemauan atau kebulatan hati dan disambung dengan kata “kami” yang memiliki arti seperti pada awal bait tadi yaitu kata ganti orang pertama jamak atau tunggal yang bersifat menunjukkan kehormatan si pembicara, lalu disambung dengan kata “segunung” berarti kata “gunung” mendapat awalan se- yang artinya seperti, jadi segunung berarti seperti gunung dan baris ini diakhiri dengan kata “tinggi” yang berarti jauh jaraknya dari posisi sebelah bawah. Dan pada baris terakhir pada bait ini diawali dengan kalimat tanya “takut siapa?” “takut” yang dalam KBBI berarti merasa gentar (ngeri) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana dan kata siapa adalah kata tanya untuk menanyakan nomina atau insan, lalu disambung dengan kata “semua” yang berarti segala dan diakhiri dengan kata “hadapi” yang memiliki kata dasar hadap dan mendapat imbuhan –i yang menjadikan kata dasar tersebut perintah.

Jadi kesimpulan makna denotasinya adalah kami tadi adalah sekumpulan orang lebih dari satu memiliki rasa ingin bertemu, keinginan bertemu tersebut seperti halnya besi yang kuat, dan mereka setiap hari berganti menunggu atau menanti. Dan pada baris ketiga dijelaskan bahwa “kami” tadi memiliki kemauan atau tekad yang tinggi seperti halnya gunung. Dan ditutup dengan pertanyaan takut siapa? menanyakan seperti menantang siapa takut, dan akan menghadapi semua yang menghalangi.

### **3.3.2. Konotasi**

#### **3.3.2.1. Makna konotasi bait pertama pada lagu Jingga**

Pada lirik lagu “Jingga” ini memiliki konteks tentang pelanggaran HAM di Indonesia yang berkonsentrasi tentang pelanggaran dengan penghilangan orang-orang atau bisa disebut aktivis dalam kurun waktu tahun 1997-1998, jadi otomatis lirik lagu ini menjurus pada hal-hal tersebut. Lalu makna konotasi pada bait pertama pada lirik lagu “Jingga” adalah terdapat kerinduan atau keinginan untuk bertemu dari “kami”, kami di sini adalah keluarga korban pelanggaran HAM yang hilang hingga saat ini belum jelas kabarnya, kerinduan atau keinginan tersebut sangat kuat. Keluarga korban tersebut selalu menanti kedatangan korban ataupun kabar tentang kasus yang menimpa keluarganya, mereka memiliki kemauan atau kebulatan hati yang sangat tinggi ibarat gunung yang menjulang tinggi. Bahkan keluarga korban tersebut memiliki prinsip tak kenal rasa takut untuk mencari kebenaran atau nasib keluarga mereka yang menjadi korban, semua rintangan akan dihadapinya. Dari analisis lirik tersebut menunjukkan terdapat representasi kritik sosial pada bait pertama tentang menuntutnya keluarga korban pelanggaran HAM untuk segera diusut tuntas kasus keluarganya yang menjadi korban penculikan dan penghilangan.

### 3.3.1.2. Makna denotasi bait kedua pada lagu **Jingga**

Bait kedua:

“Yang hilang Menjadi katalis”

“Disetiap kamis”

“Nyali Berlapis”

Pada bait kedua lirik lagu “Jingga” ini diawali dengan kata “yang” berarti kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikut diutamakan, lalu dilanjutkan dengan kata “hilang” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak ada lagi/lenyap/tidak kelihatan, lalu ada kata “menjadi” yang berarti dipilih dan dilanjutkan dengan kata “katalis” yang dalam KBBI berarti zat yang dapat mempercepat atau memperlambat reaksi yang pada akhir reaksi dilepaskan kembali dari bentuk semula. Lalu pada baris kedua diawali dengan kata “disetiap” yang berarti disatu atau di setiap, dan “kamis” adalah hari yang kelima dalam seminggu. Dan pada baris terakhir pada bait ini terdapat kata “nyali” yang berarti keberanian dan ditutup dengan kata “berlapis” yang berarti memiliki susunan atau bagian.

Jadi kesimpulannya adalah ada sesuatu yang hilang atau tidak ada, dan dari ketiadaan tersebut memicu katalis atau zat yang dapat mempercepat atau memperlambat reaksi yang pada akhir reaksi dilepaskan kembali dari bentuk semula, dan katalis tersebut ada atau bereaksi pada setiap hari kamis atau hari kelima pada seminggu, pada setiap kamis tersebut terdapat nyali atau keberanian yang berlapis atau lebih/berlapis nyalinya.

### 3.3.2.2. Makna konotasi bait kedua pada lagu *Jingga*

Pada lirik lagu “*Jingga*” bait kedua masih konteks tentang pelanggaran HAM di Indonesia yang berkonsentrasi tentang pelanggaran dengan penghilangan orang-orang atau bisa disebut aktivis dalam kurun waktu tahun 1997-1998, jadi masih memiliki keterkaitan antara lirik pada bait sebelumnya dan setelahnya nanti.

Jadi makna konotasi pada lirik tersebut adalah bahwa orang-orang yang hilang pada kurun waktu tahun 1997-1998 tersebut menjadi sebuah zat yang mempercepat atau menjadi *trigger* bagi keluarga korban untuk berkumpul disetiap hari kamis, mengapa yang dipilih hari kamis, karena terdapat aksi diam *kamisan* di depan Istana Negara dari para keluarga korban khususnya korban pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Pada hari itu nyali atau keberanian mereka keluarga korban berlapis-lapis untuk selalu mempertanyakan nasib keluarga mereka yang hilang dan hingga saat ini tidak ada kabarnya.

Dan dengan analisis tersebut terlihat bahwa pada bait kedua mengandung representasi kritik sosial hampir seperti pada bait pertama, yaitu yang menjadi korban penghilangan diusut tuntas kasusnya, dan pada lirik bait kedua ini ditegaskan bahwa mereka para keluarga korban sampai harus melakukan aksi untuk menuntutnya.

### 3.3.1.3. Makna denotasi bait ketiga pada lagu **Jingga**

Bait ketiga:

“Marah Kami”

“Senyala api”

“Di depan istana berdiri”

Pada bait ketiga lirik lagu “Jingga” ini diawali dengan kata “marah” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sangat tidak senang (karena dihina atau diperlakukan tidak sepatutnya, lalu dilanjutkan dengan kata “kami” yang berarti kata ganti orang pertama jamak atau tunggal yang bersifat menunjukkan kehormatan si pembicara. Dan pada baris kedua diawali dengan kata “senyala” yang mempunyai kata dasar nyala dan mendapat awalan “se-“ yang berarti seperti, “nyala” yang berarti masa gas yang berpijar yang timbul dari benda yang terbakar atau cahaya yang keluar dari api, jadi arti kata “senyala” berarti seperti cahaya yang keluar dari api, dan pada baris terakhir terdapat kata “di depan” “di” menunjukkan keterangan tempat dan “depan” berarti hadapan, lalu selanjutnya terdapat kata “istana” yang dalam KBBI berarti rumah atau kediaman resmi raja dan ditutup dengan kata “berdiri” yang berarti tegak bertumpu pada kaki.

Lalu kesimpulan dari makna denotasi tersebut adalah terdapat sekumpulan orang yang marah atau sangat tidak senang, kenapa sekumpulan karena pada lirik tersebut ditulis kami yang menunjukkan lebih dari satu orang, lalu ketidak senangan orang-orang tadi diibaratkan seperti nyala atau seperti cahaya yang

keluar dari api yang membara, kemarahan tersebut dilakukan di bagian depan rumah raja atau istana.

### **3.3.2.3. Makna konotasi bait ketiga pada lagu Jingga**

Pada lirik lagu “Jingga” bait ketiga ini masih dalam konteks pelanggaran HAM di Indonesia dan memiliki keterkaitan dengan lirik lagu pada bait pertama dan kedua. Jadi makna konotasi pada lirik lagu “Jingga” pada bait ketiga adalah keluarga korban pelanggaran HAM tadi menyatakan sangat marah atau sangat tidak senang dengan perlakuan yang dilakukan oleh pelanggar HAM kepada keluarga mereka ataupun marah terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM tersebut tidak ada hasil yang signifikan, kemarahan tersebut dilakukan tepat di depan Istana Negara Republik Indonesia, lokasi tersebut adalah lokasi dari aksi kamisan, yang dilakukan setiap hari kamis sore, dilakukan dengan cara memakai pakaian serba hitam dan payung hitam dan dilakukan dengan berdiri dan berdiam diri.

Dari analisis tersebut dapat diketahui representasi kritik sosial pada lirik lagu “Jingga” pada bait ketiga adalah desakan kepada pemerintah tentang penanganan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada kurun waktu 1997-1998, yang hingga saat ini keluarga korban masih terus berjuang mencari keadilan dan kejelasan tentang kasus tersebut yang dilakukan dengan aksi kamisan di depan Istana Negara.

#### 3.3.1.4. Makna denotasi bait keempat pada lagu Jingga

Bait keempat:

“Yang ditinggal”

“Takkan pernah diam”

“Mempertanyakan kapan pulang?”

Pada bait keempat ini diawali dengan kata “yang” berarti kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikut diutamakan, lalu disambung dengan kata “ditinggal” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti masih tetap di tempatnya, dan pada baris kedua diawali dengan kata “takkan” yang mempunyai kata dasar “tak” yang berarti tidak dan “akan” untuk menyatakan sesuatu yang hendak terjadi, dan disambung dengan kata “pernah” yang berarti sudah menjalani/mengalami, dan kata “diam” yang dalam KBBI berarti tidak bersuara/tidak bergerak. Dan pada baris ketiga atau baris terakhir ini terdapat kalimat tanya yang diawali dengan kata “mempertanyakan” yang berarti permintaan keterangan, lalu “kapan” sebuah kata tanya untuk menanyakan waktu dan kata “pulang” yang dalam KBBI berarti pergi ke rumah/ke tempat asalnya.

Jadi kesimpulan makna denotasinya adalah terdapat sesuatu yang ditinggal atau masih berada di suatu tempat, yang ditinggal disuatu tempat tersebut tidak akan pernah diam atau akan bertanya terus menerus, bertanya kepada sesuatu yang meninggalkannya, kapan kembali ke rumah atau ke tempat asalnya?

#### **3.3.2.4. Makna konotasi bait keempat pada lagu Jingga**

Pada lirik lagu “Jingga” bait keempat ini masih dalam konteks pelanggaran HAM di Indonesia dan memiliki keterkaitan dengan lirik lagu sebelumnya. Jadi makna konotasi pada lirik lagu “Jingga” pada bait keempat ini adalah yang disebutkan yang ditinggal pada lirik tersebut adalah keluarga-keluarga korban pelanggaran HAM yang hilang dalam kurun waktu 1997-1998, mereka yang ditinggal tidak akan pernah diam atau tidak akan pernah lelah dan selalu menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Mereka keluarga korban selalu mempertanyakan pula keluarga mereka yang hilang “kapan pulang” sebuah sindiran kepada pemerintahan yang menangani kasus tersebut tentang ketidak jelasannya nasib korban pelanggaran HAM tersebut.

Dari analisis yang dilakukan pada lirik bait keempat tersebut terdapat representasi kritik sosial tentang bagaimana usaha keluarga korban pelanggaran HAM yang hilang pada kurun waktu 1997-1998 tidak selalu didengar dan tidak segera diusut kasusnya secara tuntas, pemerintah seakan-akan melupakan kejadian tersebut, namun keluarga selalu menolak untuk lupa.

#### **3.3.1.5. Makna denotasi bait kelima pada lagu Jingga**

Bait kelima:

“Dedy Hamdun HILANG Mei 1997”

“Ismail HILANG Mei 1997”

“Hermawan Hendrawan HILANG Maret 1998”

“Hendra Hambali HILANG Mei 1998”

“M Yusuf HILANG Mei 1997”

“Nova Al Katiri HILANG Mei 1997”

“Petrus Bima Anugrah HILANG Maret 1998”

“Sony HILANG April 1997”

“Suyat HILANG Februari 1998”

“Ucok Munandar Siahaan HILANG Mei 1998”

“Yadin Muhidin HILANG Mei 1998”

“Yani Afri HILANG April 1997”

“Wiji Tukul HILANG Mei 1998”

Berbeda dengan lirik pada bait-bait sebelumnya, pada lirik pada bait kelima ini berisi tentang runtutan sebuah nama-nama orang dan diimbui kata “hilang” dan diakhiri dengan bulan dan tahun. Arti “hilang” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti tidak ada, tidak kelihatan, atau lenyap. Jadi kesimpulannya nama-nama orang yang terdapat pada lirik tersebut tidak ada, tidak kelihatan, atau lenyap di bulan dan tahun yang tercantum di akhir baris.

### **3.3.2.5. Makna konotasi bait kelima pada lagu Jingga**

Pada bait kelima ini masih menjadi kesatuan tema dari lirik pada bait-bait sebelumnya, bahkan pada lirik bait kelima inilah seperti pamungkas atau *point* penting pada lagu ini, jadi makna konotasi pada lirik lagu “Jingga” bait kelima tersebut adalah terkait penghilangan ataupun penculikan 13 aktivis pada kurun waktu tahun 1997-1998 terdapat nama-nama korban seperti Dedy Hamdun,

Ismail, Hermawan Hendrawan, Hendra Hambali, M Yusuf, Nova Al Katiri, Petrus Bima Anugrah, Sony, Suyat, Ucock Munandar Siahaan, Yadin Muhidin, Yani Afri, dan Wiji Tukul, yang hingga kini tidak ada kabarnya, dan penanganan kasusnya tidak jelas. Kabarnya penculikan tersebut didalangi oleh Tim Mawar, dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus berdasar perintah langsung dan tertulis dari Komandan Jendral (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Prabowo Subianto.

Dari analisis makna denotasi dan konotasi di atas mendapat kesimpulan bahwa representasi kritik sosial pada bait kelima ini adalah sebuah pengingat dan penolak lupa tentang nama-nama korban penculikan 13 aktivis yang hingga kini nasibnya tidak diketahui oleh keluarganya. Dan tersangka yang saat ini sudah menjalani hukuman dari kesatuannya malah dikabarkan naik pangkat, sungguh ironis sistem hukum yang ada di Indonesia ini.

Di Indonesia, pelanggaran-pelanggaran hak sipil dan politik mempunyai sejarah yang cukup panjang. Ini terlihat dari berbagai laporan tentang keadaan HAM di Indonesia, baik yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga-lembaga HAM di dalam maupun diluar negeri. Setelah melihat berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, pada umumnya laporan-laporan ini merekomendasikan dan menuntut agar pemerintah Indonesia memberikan perlindungan dan penghargaan yang lebih tinggi terhadap hak sipil dan politik masyarakat. Ini memiliki makna yang sangat dalam. Pelanggaran HAM yang seringkali terjadi itu, sesungguhnya adalah hasil akhir dari tidak dihormatinya hak sipil dan politik masyarakat. Oleh karena itu, bagi mereka yang prihatin terhadap keadaan HAM di Indonesia, sumber utama pelanggaran hak sipil dan politik tersebut adalah paket lima UU Politik yang

dikeluarkan pada tahun 1985. Paket undang-undang ini telah memasung kebebasan masyarakat. Tidak itu saja, paket undang-undang ini juga telah memotong jalur-jalur komunikasi aspirasi masyarakat (Soares et al, 1997, p. viii).

Masalah utama yang menghantui gagasan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu adalah bayang-bayang kegagalan. Pertanyaannya adalah dapatkah diselesaikan melalui prosedur hukum formal, prosedural, birokratis, dan normatif, yang menuntut ketersediaan bukti-bukti formal dan materiil? Dapatkah hakim “berdiri tegak” bekerja dalam tekanan rezim atau agen-agen rezim masa lalu, demi hukum dan keadilan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan keraguan itu.

Para pemimpin militer yang merasa terancam oleh pengadilan dikhawatirkan berusaha mengubah keadaan dengan melakukan kudeta-kudeta pemberontakan, atau konfrontasi lain yang akan melemahkan kekuasaan pemerintahan sipil yang baru tumbuh. Dalam situasi itu, pengadilan dikhawatirkan justru bisa memperkuat kecenderungan militer menantang institusi-institusi demokrasi.

Kekhawatiran tersebut beralasan; selain karena telah terbukti terjadi di banyak negara transisional, juga secara objektif, mengoprasikan “mesin” hukum menyelidiki dan mengadili kejahatan HAM masa lalu yang pelakunya kebanyakan dari kalangan militer memang tidak mudah. Itulah sebabnya TAP MPR No. V/MPR/2000 Bab V angka 3, dan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM pasal 47 beserta penjelasannya sudah menyediakan alternatif berupa

mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang kemudian diatur dalam UU No. 27 Tahun 2004, tetapi belum sempat digunakan karena terlanjur dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Tidak memuaskannya proses dan putusan pengadilan HAM kasus Timor Timur, kasus Tanjung Priok, penanganan kasus Semanggi I dan Semanggi II, serta pembatalan UU KKR, telah mengundang spekulasi hukum dan politik serta memunculkan pertanyaan umum yang menarik diteliti. Apakah tekanan kekuatan politik pendukung Orde Baru sesuatu yang faktual dan telah menyebabkan lemahnya kemauan politik penguasa baru untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu? Ataukah institusi dan aparaturnya yang tidak ada berdaya menegakkan hukum HAM?

Dari pertanyaan-pertanyaan umum yang problematis tersebut, secara hipotesis dapat dinyatakan bahwa tidak bekerjanya hukum HAM beserta institusinya dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu tidak saja karena problem substansi hukum (*legal substansive*), prosedural hukum (*legal procedural*) HAM itu sendiri, dan ketidakmandirian aparaturnya, tetapi juga karena pengaruh kekuatan politik Orde Baru yang masih eksis (Marzuki, 2012, p. 3:4).

Padahal pada UU No.39 Tahun 1999 Pasal 2, telah jelas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan

ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Muhtaj, 2015, p. 161).

Namun pada kenyataannya apa yang disebutkan pada UU di atas kurang dalam realisasinya, bahkan setelah pelanggaran HAM terjadi pun penyelesaian kasusnya tidak jelas dan terombang-ambing.

Tersendatnya penanganan atau penegakan kasus pelanggaran HAM terjadi karena beberapa hal ini. Logikasilogisme dalam hukum positif mengharuskan adanya dokumen tertulis atau bukti-bukti tertulis untuk meyakini dan mendasari terjadinya proses atau transaksi hukum sebagaimana tuntutan prinsip rasionalitas pada hukum materiil dan hukum formal. Selain itu, diharuskan pula ditempuhnya prosedur dan mekanisme dalam penegakannya. Tanpa itu, penegakan hukum tidak bisa dijalankan. Begitulah cara pandang dan keyakinan hukum para penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menegakkan atau menerapkan hukum terhadap suatu kasus.

Keharusan adanya hukum positif, sesuai asas legalitas, serta tersediannya bukti-bukti tertulis, prosedur dan mekanisme yang tetap dalam perwujudannya sering kali dirasakan menjadi tidak adil bagi pihak tertentu yang dirugikan atau pihak korban (dalam hukum publik) yang tidak memiliki cukup bukti. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang notabene merupakan jenis perbuatan baru yang dirumuskan sebagai kejahatan oleh undang-undang, dipastikan akan menghadapi kendala pada level hukum materiil, formal, prosedur mekanisme, dan kemampuan manusia pelaksana hukum itu. Ada kemungkinan hukum materiil dan

formal tidak cukup jelas atau tidak tepat dalam mengatur, prosedur dan mekanismenya berbelit, serta aparaturnya penegak hukumnya tidak terlatih, atau terbiasa dengan cara berpikir silogisme sehingga penegakan hukum HAM berjalan tidak sebagaimana diharapkan, atau bahkan mengecewakan.

Penegakan hukum HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui pengadilan dalam pengalaman banyak negara pada umumnya terkendala oleh sulitnya mencari alat bukti dan saksi karena kasusnya telah melampaui waktu yang relatif lama, tidak bisa menjangkau kasus dalam jumlah besar, memakan waktu lama dan berlarut-larut, berpotensi gagal akibat kegagalan memenuhi syarat-syarat hukum formal dari proses hukum itu sendiri, serta tidak objektif akibat cara berpikir dan menilai dari aparaturnya penegak hukum terhadap kasus terkontaminasi oleh rezim sebelumnya.

Fenomena penegakan hukum dalam kerangka perspektif normatif itu dikritik sebagai penegakan hukum yang buta atas realitas di mana hukum itu dibuat, hidup, dan bekerja. Keadilan formal (*formal justice*) yang mengacu sepenuhnya kepada terpenuhinya unsur materiil tindakan serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan hukum, tanpa menghiraukan adanya aspek-aspek sosial, moral, politik, kultural, dan manusia pelaksana hukum akan menjadi halangan utama penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Tepat apa yang dikatakan oleh Francis Fukuyama bahwa penegakan hukum di Indonesia mengalami *moral miniaturization* atau pengerdilan moral suatu ungkapan kritis dalam mengapresiasi penegakan hukum yang menafikan aspek-aspek keadilan dalam tataran praksis (Marzuki, 2012, p. 8:9).

Politik hukum penyelesaian pelanggaran berat HAM di masa lalu melalui pengadilan dimaksudkan untuk mengakhiri atau memutus rantai *impunity*, yaitu suatu tindakan kekuasaan yang tidak mengambil tindakan hukum apa pun atas suatu kejahatan yang dilakukan (*absence of punishment*), atau dengan kata lain, meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang belum dipertanggungjawabkan. Tidak dipenuhinya kewajiban negara untuk menuntut, mengadili, dan menghukum pelaku telah menimbulkan impunitas bagi perancang dan pelaku kejahatan manusia.

Usaha mengakhiri kekebalan hukum (impunitas) pelaku di negara-negara transisional antara “memaafkan atau menghukum” berada dalam perdebatan. Perdebatan itu dipicu oleh tidak mudahnya menangani pelanggaran HAM yang berat masa lalu pada khususnya atau penindasan rezim sebelumnya pada umumnya. Gagasan untuk melupakan sebagai pintu masuk rekonsiliasi dikritik oleh Tina Rosenberg sebagai bukan rekonsiliasi yang sebenarnya, melainkan rekonsiliasi dibawah tekanan (Marzuki, 2012, p. 48:50).

Padahal pada UU No.39 Tahun 1999 bagian keempat pasal 17 telah tertulis bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Muhtaj, 2015, p. 164).

Itu artinya setiap warga memang harus mendapat keadilan, jangan hanya tebang pilih, tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Selama hukum berpihak ke struktur atas maka selama itu pula sia-sia untuk berbicara mengenai HAM, karena hukum yang demikian itu tak memenuhi HAM rakyat miskin. Malah andai hukum itu tidak berpihak sekalipun jika kita berada di negara yang jurang antara si kaya dan si miskin itu cukup tajam maka tidak mungkin kita berbicara mengenai HAM. Adalah omong kosong bicara mengenai *equality before the law* dalam situasi ekonomi yang tidak sama (Sunggono & Harianto, 1994, p. 105).

Tarik menarik antara kekuatan baru yang menginginkan pengusutan dan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM selalu dalam bayang-bayang gerakan pendukung rezim pelanggar hukum yang berusaha sekuat tenaga “memutihkan” kejahatannya dengan cara mendorong diberikannya amnesti sebagai perisai. Tidak sedikit negara yang terlena atau tidak berdaya, lalu memberikan amnesti kepada pelaku, yang notabene adalah agen-agen negara, yang sesungguhnya adalah *impunity*.

Fenomena *impunity* di Indonesia terjadi juga di era Orde Baru. Tidak satupun pelaku pelanggaran HAM di era tersebut dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk apa pun. Oleh karena itulah, peralihan kekuasaan Soeharto ke B. J. Habibie, sebagaimana peralihan kekuasaan otoritarian ke demokrasi di banyak negara mewarisi pelanggaran HAM yang belum dipertanggungjawabkan, dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan pasca Orde Baru (Marzuki, 2012, p. 50:51).

Bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia yang diakibatkan oleh keterlibatan secara mendalam pihak-pihak aparat keamanan negara (dalam hal ini tentara dan polisi). Berbagai macam kasus sipil yang terjadi di dalam masyarakat justru menjadi arena pelanggaran Hak Asasi Manusia setelah melibatkan aparat keamanan (Soares et al, 1997, p. 259).

Secara utuh seharusnya negaralah yang harus bertanggung jawab menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Pengertian tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM adalah melakukan pengusutan, pengadilan, dan penghukuman, termasuk mengungkapkan kebenaran demi keadilan bagi para korban atau keluarganya, dan bukan pemberian ampunan atau pemaafan (amnesti).

Dalam konteks Indonesia, pemerintahan era reformasi didesak untuk bertanggung jawab menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di era sebelumnya, terutama di era Orde Baru. Respons pemerintahan B. J. Habibie atas desakan untuk bertanggung jawab dimulai dengan melepas sejumlah tahanan politik, mencabut undang-undang atau peraturan-peraturan yang membelenggu hak sipil dan hak politik, dan mengagendakan kebijakan yang terfokus terhadap pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Semua rencana tersebut secara implisit adalah pertanggungjawaban yang bersifat pemulihan (khususnya pelepasan tahanan politik) serta proteksi guna mencegah penguasa melanggar HAM di masa depan (Marzuki, 2012, p. 54:55).

Namun pada akhirnya keluarga korbanlah yang harus bersikukuh berusaha mencari keadilan untuk keluarganya yang hilang atau mengalami pelanggaran HAM, salah satunya dengan menggelar Aksi Diam Kamisan, aksi tersebut terbentuk dari Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), yaitu sebuah paguyuban korban/keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mengadakan sharing bersama Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK) dan KontraS untuk mencari alternatif kegiatan dalam perjuangannya. Pada pertemuan hari Selasa, tanggal 9 Januari 2007, bersama KontraS dan JRK, disepakati untuk mengadakan suatu kegiatan guna bertahan dalam perjuangan mengungkap fakta kebenaran, mencari keadilan dan melawan lupa. Sebuah kegiatan berupa “Aksi Diam” sekali dalam seminggu menjadi pilihan bersama. Bahkan disepakati pula mengenai hari, tempat, waktu, pakaian, warna dan maskot sebagai simbol gerakan.

Aksi ini diberi nama “Aksi Kamisan” karena acara tersebut dilakukan pada setiap hari kamis dan hari di mana peserta rapat bisa meluangkan waktunya. Aksi tersebut dilakukan di depan Istana Presiden karena istana merupakan simbol pusat kekuasaan. Dan dilakukan pada sore hari jam 16.00-17.00, waktu tersebut dipilih karena lalu lintas di depan Istana Presiden ramai oleh kendaraan pulang kerja. Dengan membawa payung hitam sebagai maskotnya yang merupakan simbol perlindungan dan keteguhan iman. Aksi tersebut dilakukan sudah sejak hari Kamis, 18 Januari 2007 hingga saat ini (<http://www.aksikamisan.net/tentang/> Diakses pada 1 November 2017 jam 22.00).

Dalam berita yang diliput oleh media massa Kompas online yang dimuat pada 07/03/2011 menyatakan bahwa kasus penculikan aktivis yang terjadi pada 1997-1998 tak pernah benar-benar selesai. Satu orang terbunuh, 11 orang disiksa, 12 orang dianiaya, 23 orang dihilangkan secara paksa, 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya secara sewenang-wenang. Dan dari 23 orang yang dihilangkan paksa, 13 orang belum diketahui nasibnya (<http://nasional.kompas.com/read/2011/03/07/08145646/13.Tahun.Mencari.13.Orang.Hilang> diakses pada 1 November 2017 jam 21.26).

Pada media massa online Merdeka juga memberitakan pada 08/05/2016 bahwa sebagian besar warga Indonesia yang kritis kala itu sempat mendesak agar aparat militer berani bertanggung jawab. Namun hingga hari ini masih ada 13 aktivis 1998 yang tak diketahui di mana rimbanya.

Tapi penuntasan kasus tersebut patah di tengah jalan. Tim Mawar yang dibentuk di bawah Grup IV Kopassus berdasarkan perintah langsung dan tertulis dari Prabowo tersebut, gagal diboyong ke pengadilan HAM.

Menengok ke belakang, meski bertindak lambat, kala itu pemerintah melalui Panglima TNI Wiranto, membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Saat yang bersamaan, pada (3/7/1998) itu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Subagyo Hadisiswoyo diangkat sebagai ketua. Hasil DKP kemudian disetujui oleh Wiranto.

Jelang setahun setelahnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) mencatat, tepat (6/4/1999) digelar sidang

Mahkamah Militer. Ada 11 terdakwa yang tergabung dalam Tim Mawar. Keputusan pengadilan ini, mereka hanya dituntut sebagai pelaku kejahatan perampasan kemerdekaan secara bersama-sama dengan putusan Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II Jakarta dengan nomor perkara PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999, menyatakan seluruhnya dipecat.

Namun tak sampai di situ, lagi-lagi proses pengadilan melecehkan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada tingkat banding sanksi hukum berupa pemecatan dari dinas kemiliteran kepada 7 anggota Tim Mawar 4 terpidana justru dihadiahi promosi pengangkatan jenjang karir. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara berjamaah oleh Tim Mawar tersebut dilewatkan jalur pengadilan yang ambigu. Menurut laporan tim ad hoc Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Penghilangan Orang Secara Paksa (PPOSP) periode 1997-1998, Tim Mawar adalah yang bertanggung jawab atas peristiwa penculikan puluhan aktivis ini (<https://www.merdeka.com/peristiwa/jalan-panjang-mencari-keadilan-hilang-13-aktivis-98.html> diakses pada 1 November 2017 jam 21.42).

### **3.3.3 Mitos pada lirik lagu Jingga**

Dalam lirik lagu “Jingga” ini banyak membahas tentang bagaimana tentang sebuah perjuangan dari keluarga korban pelanggaran HAM dalam kurun waktu tahun 1997-1998 yang kasusnya hingga saat ini belum ditangani dengan serius, perjuangan tersebut dilakukan dengan menggelar aksi diam kamisan di depan Istana Negara setiap hari kamis sore.

Dengan menganalisis makna denotasi dan makna konotasi di atas dan ditambah rujukan dari berbagai sumber, pada lirik lagu berjudul “Jingga” tersebut menghasilkan mitos bahwa pihak penegak hukum masih kurang serius dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Masyarakat jadi kurang percaya dengan sistem penegakan hukum yang ada saat ini, yang hanya tumpul ke atas namun tajam ke bawah.

#### **3.4. Representasi Kritik Sosial pada Lagu Kuning**

Pada lagu ketiga atau menjadi lagu terakhir yang akan menjadi bahan penelitian penulis ini berjudul “Kuning” pada lagu ini terkandung representasi kritik sosial mengenai keberagaman atau multikulturalisme yang ada di Indonesia.

Banyak negara saat ini yang secara budaya beragam. Menurut perkiraan terakhir, ke 184 negara merdeka di dunia ini terdiri atas 600 kelompok bahasa hidup, dan 5.000 kelompok etnis. Hanya di beberapa negeri dapat dikatakan bahwa warganya memiliki bahasa yang sama atau termasuk dalam kelompok etnonasional yang sama. Di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali perbedaan yang ada, mulai dari suku, ras, agama, bahasa dan lain sebagainya. Keanekaragaman ini menimbulkan sejumlah pertanyaan penting dan secara potensial terpecah-pecah. Kaum minoritas dan mayoritas semakin banyak berselisih mengenai berbagai hal seperti hak berbahasa, otonomi daerah, perwakilan politik, kurikulum pendidikan, tuntutan lahan, imigrasi dan kebijakan naturalisasi, bahkan lambang-lambang nasional, seperti lagu kebangsaan atau hari-hari besar nasional (Kymlicka, 2003, p. 1).

Zamroni mengatakan (2011, p. 1) bahwa manusia senantiasa memerlukan hidup bersama. Kebersamaan hidup ini akan melahirkan masyarakat, yaitu suatu kelompok yang terdiri dari berbagai keluarga yang hidup berdampingan dan bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan guna melangsungkan kehidupannya. Hal inilah yang akan ditekankan dan menjadi cita-cita Efek Rumah Kaca dalam lagu yang berjudul “Kuning”.

### **3.4.1. Denotasi**

#### **3.4.1.1. Makna denotasi bait pertama pada lagu Kuning**

Bait Pertama:

“Manusia menafikan tuhan”

“Melarang atas perbedaan”

“Persepsi dibelenggu tradisi”

“Jiwa yang keruhpun bersemi”

“Nihil maknanya”

“Hampa surganya”

“Hampa”

“Karena cinta bersemayam dalam jiwa”

Pada awalan lirik lagu “Kuning” ini diawali dengan kata “manusia” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti makhluk yang berakal

budi (mampu menguasai makhluk lain), dalam kitab suci Al-Quran juga terdapat pengertian manusia juga, dan dituliskan dengan kata An-Nas dan Insan, An-Nas berarti manusia merupakan makhluk sosial yang seringkali digambarkan dengan sekumpulan manusia (kelompok) yang suka melakukan mafsadah. Sementara arti Insan berasal dari kata Al Uns, yang secara etimologis berarti harmonis, lemah lembut, tampak atau pelupa. Lalu kata kedua pada baris pertama terdapat kata “menafikan” yang dalam KBBI berarti menolak atau mengingkari, lalu selanjutnya terdapat kata “tuhan” yang dalam KBBI berarti sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya.

Pada baris kedua diawali dengan kata “melarang” yang dalam KBBI berarti memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu. Lalu dilanjutkan dengan kata “atas” dalam KBBI masuk ke dalam pengertian ketiga yang berarti berdasarkan atau menurut, dan dilanjutkan dengan kata “perbedaan” yang berarti sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dengan benda yang lain. Pada baris ketiga diawali dengan kata “persepsi” yang dalam KBBI berarti tanggapan (penerimaan), dan dilanjutkan dengan kata “dibelenggu”, “belenggu” dalam KBBI berarti ikatan atau alat untuk mengikat tangan dan imbuhan “di-“ pada awal kata yang menjadikan kata kerja lalu pada akhir baris terdapat kata “tradisi” yang dalam KBBI mengacu pada pengertian kedua yaitu penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.

Lalu pada baris keempat diawali dengan kata “jiwa” yang dalam KBBI berarti roh manusia (yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup dan dalam pengertian kedua berarti seluruh kehidupan batin manusia (yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya). Lalu terdapat kata hubung “yang” berarti menyatakan, lalu disambung dengan kata “keruhpun”, “keruh” dalam KBBI berarti buram karena kotor, tidak bening atau tidak jernih atau dalam pengertian kedua berarti kusut tidak keruan, kalut tidak beres dan mendapat imbuhan “-pun” membentuk kata dasar yang kemudian memiliki makna seperti juga. Dan pada kata terakhir baris keempat terdapat kata “bersemi”, “semi” berarti tunas dan tambahan “ber-“ menyatakan kepunyaan.

Pada baris kelima terdapat kata “nihil” yang dalam KBBI berarti kosong sama sekali atau tidak ada apa-apa dan kata “maknanya”, “makna” dalam KBBI berarti pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan dan imbuhan “-nya” menyatakan milik. Pada bait keenam juga hanya terdapat dua kata yang pertama adalah kata “hampa” yang berarti tidak berisi atau kosong dan selanjutnya kata “surganya”, “surga” yang dalam KBBI berarti alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang hendak tinggal didalamnya (dalam keabadian), dan imbuhan “-nya” yang menyatakan milik. Pada baris selanjutnya hanya terdapat satu kata yang merupakan penegasan pada baris sebelumnya yaitu kata “hampa” yang berarti tidak berisi atau kosong.

Pada baris terakhir atau baris kedelapan bait pertama diawali dengan kata “karena” yaitu kata penghubung untuk menandai sebab atau alasan, lalu kata “cinta” yang dalam KBBI berarti suka sekali atau sayang benar, dan kata

selanjutnya adalah “bersemayam” dalam KBBI berarti berkediaman/tinggal, dan kata “dalam” berarti jauh kebawah dan ditutup dengan kata “jiwa” yang dalam KBBI berarti roh manusia (yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup dan dalam pengertian kedua berarti seluruh kehidupan batin manusia (yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya).

Jadi kesimpulan pada bait pertama ini adalah terdapat makhluk yang berakal budi atau biasa disebut manusia, manusia tersebut mengingkari tuhannya atau mengingkari sesuatu yang diyakini untuk disembah. Lalu manusia tersebut memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu yang tidak sama, jadi manusia tersebut hanya menghendaki semua harus sama, lalu pada baris ketiga masih memiliki keterkaitan dengan baris sebelumnya, manusia tadi membelenggu atau mengikat tanggapan dari orang lain dengan cara-cara yang sudah ada lebih dulu, yang mereka anggap cara itu adalah cara yang paling baik dan benar/tidak mau adanya pembaruan atau sesuatu yang lain lagi.

Dan pada manusia tersebut memiliki kehidupan batin yang kotor atau keruh dan kekotoran tersebut bertunas atau selalu bertambah. Lalu pada baris selanjutnya dijelaskan dengan menyikapi perbedaan dengan sikap seperti itu hanya akan memiliki makna kehidupan yang kosong, lalu surga atau alam akhirat yang membahagiakan dan diidamkan oleh manusia tersebut hanya kosong belaka. Dan pada akhir bait terdapat sebuah *statement* bahwa cinta atau rasa sayang terhadap sesama makhluk tuhan yang lain berada dalam kehidupan batin manusia.

### **3.4.2. Konotasi**

#### **3.4.2.1. Makna konotasi bait pertama pada lagu Kuning**

Pada lirik lagu “Kuning” bait pertama ini makna konotasinya adalah saat ini terdapat golongan manusia yang katanya taat kepada tuhan mereka namun di sisi lain mengingkari dasar dari arti agama tersebut yaitu saling menghormati dengan umat lain, golongan manusia ini merasa dirinya dan golongannya adalah yang paling baik dan benar dan menganggap yang lainnya adalah salah. Pendapat atau tanggapan dari orang-orang yang berbeda haluan dengan mereka selalu dibantah dengan tradisi mereka yang menurutnya itu paling benar dan paling baik.

Dalam jiwa dan hati mereka tumbuh jiwa-jiwa yang kotor karena perbuatannya, dan makna kehidupan yang mereka cari saat ini yang mereka gadang-gadang akan menjadikannya masuk ke dalam surga hanya akan kosong semata jika perbuatannya dengan golongan lain masih seperti itu atau tidak toleransi dengan golongan lain.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa representasi kritik sosial dalam lagu “Kuning” bait pertama adalah tentang kurangnya toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia, masih banyak yang merasa golongannya adalah yang terbaik dan menolak perbedaan dari golongan yang lain.

#### **3.4.1.2. Makna denotasi bait kedua pada lagu Kuning**

Bait Kedua:

“Beragam, berwarna”

“Lestariilah tumbuhnya”

“Bermacam agama”

“Dipancarkan cintanya”

“Semua bertautan”

Makna denotasi pada lirik lagu “Kuning” pada bait kedua diawali dengan kata “beragam” yang memiliki kata dasar “ragam” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti macam atau jenis dan pada mendapat awalan “ber-“ yang artinya memiliki, lalu selanjutnya kata “berwarna” yang memiliki kata dasar “warna” dalam KBBI berarti kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang kenainya, corak rupa, dan terdapat awalan “ber-“ yang menyatakan kepunyaan. Pada baris kedua terdapat kata “lestariilah” yang dalam KBBI berarti tetaplah atau seperti keadaannya semula, tidak berubah, lalu ada kata “tumbuhnya” yang berarti timbul (hidup) dan bertambah besar.

Pada baris ketiga terdapat kata “bermacam” yang memiliki kata dasar “macam” dalam KBBI mempunyai arti berarti jenis rupa, dan awalan “ber-“ berarti menyatakan jumlah, dan kata selanjutnya adalah “agama” yang dalam KBBI berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta manusia dengan lingkungannya. Dan pada baris berikutnya terdapat kata “dipancarkan” yang memiliki kata dasar “pancar” yang dalam KBBI berarti menyembur ke berbagai arah dengan berbagai cara (tentang

benda cair, sinar dan sebagainya) dan awalan “di-“ digunakan untuk menyatakan perbuatan aktif dan akhiran “-kan” yang berfungsi untuk membentuk kata kerja, lalu selanjutnya kata “cintanya”, yang memiliki kata dasar “cinta” yang berarti suka sekali atau sayang benar dan akhiran “-nya” berarti menyatakan milik.

Lalu pada baris terakhir terdapat kata “semua” yang berarti segala atau sekalian dan diakhiri dengan kata “bertautan” yang memiliki kata dasar “taut” yang dalam KBBI berarti menutup (berkatup) kembali menjadi rapat, dan pada pengertian ketiga dalam KBBI berarti berpegangan (bergandengan, berjabatan) tangan, dan awal “ber-“ dan akhiran “-an” yang bermaksud saling.

Jadi kesimpulan pada makna denotasinya adalah sesuatu yang beragam atau bermacam jenisnya dan sesuatu yang bermacam warna atau corak rupanya diharapkan tetap hidup dan bertambah besar. Lalu pada baris selanjutnya dikatakan bahwa bermacam/berbagai kepercayaan manusia tersebut dapat mengeluarkan cahaya kasih sayangnya, lalu pada akhir bait dikatakan segala kepercayaan tersebut saling berpegangan/bergandengan dalam artian rukun.

#### **3.4.2.2. Makna konotasi bait kedua pada lagu Kuning**

Pada lirik lagu “Kuning” pada bait kedua atau bait terakhir dalam penelitian ini adalah lebih kepada cita-cita sebuah lagu yang diciptakan oleh Efek Rumah Kaca untuk terwujudnya saling toleransi di Indonesia. Jadi makna konotasinya adalah bermacam-macam suku ataupun agama yang ada di Indonesia, dan berwarna kulit dan corak budayanya diharapkan akan lestari untuk kedepannya. Dan berbagai agama dan kepercayaan semoga selalu memancarkan

kasih sayang kepada umat lain dan saling bertoleransi, dan pada akhirnya semua perbedaan yang ada di Indonesia tersebut dapat terjalin menjadi satu kesatuan walau berbeda latar budaya, agama, bahasa dan warna kulitnya.

Maka representasi kritik sosial pada lirik lagu “Kuning” bait kedua ini adalah sebuah harapan atau gambaran jika masyarakat di Indonesia menghindari yang namanya konflik tentang perbedaan satu dengan yang lain dan saling toleransi akan terwujud kerukunan antar masyarakat di Indonesia, dan akan terwujudnya *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjadi semboyan negara ini.

Masyarakat multikultural merupakan suatu realitas. Hampir tidak ada suatu masyarakat yang bersifat monokultural. Bahkan sejarah telah menunjukkan setiap upaya untuk menciptakan “*monocultur*” dengan berbagai macam bentuk telah gagal, karena pada hakekatnya, masyarakat multikultural merupakan sunatullah (Zamroni, 2011, p. 31).

Kymlicka mengatakan (2003, p. 162) banyak pembela hak-hak khusus kelompok untuk minoritas etnis dan bangsa menekankan bahwa mereka diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga diperlakukan dengan kesetaraan yang sebenarnya. Atas pandangan ini ‘akomodasi dari perbedaan-perbedaan adalah inti dari kesetaraan yang sebenarnya’, dan hak-hak khusus kelompok diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan kita. Falk menambahkan (dalam Kymlicka, 2003, p. 183) bahwa keragaman masyarakat meningkatkan mutu hidup, dengan memperkaya pengalaman kita, memperluas sumber daya budaya.

Dikatakan bahwa keragaman budaya itu berharga, baik dalam arti nyaris estetis sehingga menciptakan dunia yang lebih menarik, dan karena kebudayaan lain berisi model alternatif organisasi sosial yang dapat berguna dalam menyesuaikan pada keadaan baru. Ada semacam kebenaran dalam argumentasi mengenai nilai dari keragaman budaya. Namun demikian suatu kesalahan untuk memberikan terlalu banyak bobot padanya sebagai suatu pembelaan dari hak-hak kebangsaan. Salah satu alasan mendasar untuk menghargai keberagaman dalam budaya menemui lebih sedikit penerapan dalam keragaman antar budaya. Nilai dari keragaman di dalam suatu kebudayaan adalah terbentuknya lebih banyak opsi untuk setiap individu, dan memperluas sejumlah pilihan (Kymlicka, 2003, p. 183:184).

Namun pada praktiknya, khususnya di Indonesia masih ada tindakan-tindakan brutal yang dilatarbelakangi oleh perbedaan, entah suku, agama, etnis dan lain sebagainya. Hardiman mengatakan (dalam pengantar Kymlicka, 2003, p. xv:xvi) Gelombang kerusuhan anti-Cina di Jakarta, Solo, Medan, konflik antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, konflik agama di Maluku, gerakan-gerakan separatisme Aceh dan Papua, protes-protes dari kaum fundamentalis Islam serta merebaknya tuntutan-tuntutan untuk memerintah sendiri di berbagai daerah setelah tumbang rezim Orde Baru persis menyingkapkan kenyataan bahwa problem Indonesia bukan sekadar poliernisitas, melainkan juga multinasionalitas yang mengancam keutuhan komunitas politis ini dari berbagai sudut. Kerusuhan-kerusuhan SARA dapat kita hitung sebagai *gerakan-gerakan horisontal* yang dilakukan oleh “kelompok-kelompok etnis”. Tercakup di sini

sentimen anti-Cina, konflik antara etnis Madura dan Dayak, konflik agama di Maluku, aksi-aksi demonstrasi radikalisme yang dilakukan kaum fundamentalis Islam di kota-kota dan sebagainya. Perjuangan-perjuangan separatisme Aceh dan Papua, serta tuntutan-tuntutan merdeka dari Riau, misalnya, dapat kita sebut *gerakan-gerakan vertikal* yang dilakukan oleh “minoritas-minoritas nasional”, karena segmen-segmen masyarakat ini potensial untuk memerintah dirinya sendiri.

Lopa mengatakan (1996, p. 33:34) bahwa kehidupan manusia yang bersinggungan di dalam pergaulan sering menimbulkan konflik. Upaya memperoleh kebutuhan hidup yang kompetitif sering juga melahirkan pelanggaran berbagai hak asasi manusia. Oleh karena itu kehidupan kelompok masyarakat yang bagaimanapun kecilnya tetap memerlukan pengaturan agar pergaulan dapat berjalan dengan tertib. Dalam pasal 2 UDHR dijelaskan: *setiap orang mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, tahanan politik atau paham yang lain, nasional atau asal-usul sosial, hak milik, kelahiran ataupun status yang lain. Lagipula, tidak boleh mengadakan perbedaan atas dasar perbedaan politik, kedudukan hukum atau status internasional dari negara atau wilayah di mana orang tersebut termasuk, baik negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah yang tidak berpemerintah sendiri atau di bawah wilayah lain yang kedaulatannya dibatasi.*

Bahkan dari segi bermacam-macamnya agama yang ada di dunia khususnya di Indonesia sudah di atur dalam peraturan yang universal, jadi tidak

ada alasan untuk saling membenarkan keyakinan yang mereka anut, yang kita harus lakukan adalah toleransi dengan umat agama atau keyakinan yang lain. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan berkewajiban mengabdikan kepada-Nya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sejalan dengan peradaban manusia, maka kehidupan beragama mengalami juga perkembangan yang diwarnai dengan sering terjadinya persinggungan antar pemeluk agama yang beragam itu.

Agar kehidupan beragama di dunia berjalan aman dan tertib, maka PBB sebagai badan dunia mengatur hak dan kebebasan manusia untuk memilih agama dan keyakinan yang dikehendakinya sesuai dengan UDHR pasal 18 yang berbunyi: *Setiap orang berhak untuk bebas berpikir, bertobat dan beragama; hak ini meliputi kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam bentuk beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun tersendiri* (Lopa, 1996, p. 84).

Sesuai dengan fitrah manusia dan perjalanan sejarah agama-agama besar di dunia, terutama Islam dan Kristen, maupun berbagai ajaran Budha, Hindu, Shinto, Taoisme, Zarathustra, Konfucianisme dan sebagainya, maka setiap negara mengatur dan menjamin hak dan kebebasan beragama yang dicantumkan di dalam konstitusinya.

Di dalam UUD 1945, pasal 29 berbunyi:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Indonesia mengatur kebebasan beragama secara tegas disebabkan penduduknya yang Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya 5 agama dan kepercayaan yang ditetapkan untuk dianut masyarakat (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Budha, Hindu) adalah cara tepat untuk mencegah masyarakat menciptakan lagi berbagai kepercayaan yang hanya akan memudahkan munculnya bentrokan-bentrokan (Lopa, 1996, p. 86:87).

Kalau dikaji secara lebih mendalam, kompetensi kultural dibentuk oleh empat faktor: a) penguasaan pengetahuan, b) *critical thinking* atau daya kritis, c) kemampuan mengembangkan sesuatu atau pengetahuan, dan, d) kemampuan praktis. Keempat faktor tersebut tidak statis, melainkan dinamis, terus bergerak, membentuk kompetensi kultural. Proses terus berlangsung tiada kenal henti, terus berkembang, berinteraksi dan saling berkaitan serta saling memperkuat diri dengan saling memberikan umpan balik satu sama lain. Proses interaksi memiliki sifat kontekstual, berproses dengan menyesuaikan pada kondisi dan situasi yang ada. Proses yang terjadi tersebut akan menghasilkan berbagai *output* yang bisa menjadi umpan balik bagi masing-masing faktor yang ada.

Pemberdayaan diri dalam kaitan dengan kultur sebagaimana dikemukakan di atas mencakup 5 aspek:

Pertama, menyadari dan memahami keberadaan keanekaragaman sebagai sesuatu yang alami sekaligus merupakan keniscayaan dalam kehidupan. Kalau

keanekaragaman tersebut sudah dapat dipahami, maka harus pula dapat dinikmati, artinya, bagaimana keanekaragaman tersebut bisa menjadikan kehidupan semakin indah. Kenanekaragaman bisa menjadikan kehidupan kita semakin nikmat dan membahagiakan. Jangan sampai keanekaragaman mengganggu kehidupan masyarakat.

Kedua, munculnya komitmen dan keterlibatan pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu mesti memiliki komitmen dan terlibat dalam kehidupan masyarakat yang beraneka kultur.

Ketiga, keterpanggilan dan bertanggung jawab untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu guna kepentingan bersama. Masyarakat memiliki banyak aktivitas sosial, ekonomi, kultural maupun politik. Setiap warga masyarakat, sesuai dengan peran kemampuannya harus ambil bagian. Dari sinilah muncul konsep partisipasi masyarakat, keterlibatan warga masyarakat dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keempat, meningkatkan ketrampilan kerjasama dan memecahkan masalah bersama. Kehidupan bermasyarakat penuh dengan dinamika kehidupan, termasuk berbagai masalah akan muncul. Untuk memecahkan persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, perlu adanya kerjasama di antara warga dan ketrampilan dalam memecahkan masalah.

Kelima, sifat keterbukaan dan ketrampilan melakukan perubahan. Warga masyarakat harus terbuka dengan gagasan baru dan siap melakukan perubahan serta penyesuaian dengan tuntutan-tuntutan baru sesuai dengan perkembangan

(Zamroni, 2011, p. 35-38). Hal-hal tersebut yang masuk dalam 5 aspek pemberdayaan diri dalam kaitan dengan kultur dapat menjadi cara untuk menuju masyarakat yang saling menghargai dan menghormati dalam keanekaragaman yang ada di Indonesia.

Jika kita dapat membentuk perbedaan yang ada di Indonesia menjadi hal positif maka kita juga yang akan memetik hasilnya, yaitu kemajuan untuk negara Indonesia juga. Berbagai perbedaan dan keanekaragaman yang ada dalam masyarakat kalau dikelola dengan baik, akan merupakan kekuatan bagi masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang lebih maju, makmur, sejahtera yang dilandasi dengan keadilan dan keberadaban. Sudah barang tentu keanekaragaman memiliki dinamika yang menghasilkan gerakan-gerakan di masyarakat dalam segala aspek kehidupannya: sosial, ekonomi, politik dan kultural.

Gerakan-gerakan ini bisa menghasilkan gesekan yang berwujud positif ataupun negatif. Bersifat negatif karena gesekan-gesekan yang ada dalam masyarakat akan menimbulkan perbedaan yang seringkali menjurus pada konflik. Mulai konflik dalam wujud argumentasi, intimidasi sampai konflik fisik perorangan, kelompok, bahkan sampai suku. Berwujud positif gesekan akan menimbulkan rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa sehingga melahirkan kerjasama yang menjadikan masyarakat jauh dari konflik, dan warga masyarakat merasa aman. Rasa aman ini sangat besar artinya bagi kemajuan masyarakat.

Demokrasi akan menjadikan pergesekan semakin kuat dan intens, oleh karena itu persoalan bagi masyarakat multikultural adalah bagaimana bisa mendorong munculnya pergesekan yang akan menghasilkan kondisi positif dan menjauhkan dari kondisi negatif. Persyaratan yang diperlukan untuk menjamin pergesekan yang terjadi akan menghasilkan kondisi yang positif adalah kesadaran akan kehidupan yang beranekaragam merupakan sunatullah. Kesadaran ini amat dibutuhkan karena kalau sudah dihayati oleh setiap warga bangsa akan menimbulkan sifat tenggang rasa dan toleransi. Kesadaran ini tidak akan bisa muncul dengan sendirinya dengan baik, melainkan diperlukan rekayasa, yakni suatu upaya yang disadari dan direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Rekayasa bisa dilaksanakan lewat pendidikan formal sistem persekolahan maupun lewat non-formal dalam bentuk kegiatan di lingkungan masyarakat yang melibatkan keluarga-keluarga.

Kesadaran akan karakteristik multikultural sebagai realitas bermasyarakat dan perlunya memegang teguh sifat tenggang rasa dan toleransi akan melahirkan suatu kesadaran baru bahwa kerjasama dengan segala perbedaan merupakan kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditinggalkan (Zamroni, 2011, p. 113-115).

Hardiman mengatakan (dalam pengantar Kymlicka, 2003, p. xvi) Indonesia memang bukan Yugoslavia dan bukan Rwanda, sehingga balkanisasi atau perang saudara tidak harus terjadi di sini. Sebuah negara multinasional dan polietnis tidak niscaya tercabik-cabik dari dalam, bahkan kemajemukan itu dapat menjadi dasar bagi kemajuan kemanusiaan.

### **3.4.3. Mitos pada lirik lagu Kuning**

Dalam lirik lagu “Kuning” ini banyak membahas tentang bagaimana perbedaan yang ada di Indonesia khususnya masih dapat memicu konflik, lalu pada bait selanjutnya dijelaskan sebuah cita-cita dari lagu tersebut yaitu terciptanya masyarakat yang saling menghargai satu sama lain.

Dengan menganalisis makna denotasi dan makna konotasi di atas dan ditambah rujukan dari berbagai sumber, pada lirik lagu berjudul “Kuning” tersebut menghasilkan mitos bahwa tindakan toleransi di Indonesia saat ini masih kurang berjalan dengan semestinya, masih banyak konflik terjadi yang dilatarbelakangi oleh perbedaan, seperti perbedaan agama, suku, ras, pilihan politik dan lain sebagainya namun di balik terjadinya konflik tersebut masih terdapat sebuah cita-cita yang mulia yaitu bersatunya masyarakat Indonesia walau dengan latar belakang yang berbeda.

### **3.5. Catatan Penutup**

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan metode semiotika Roland Barthes, dengan memakai metode tersebut penulis dapat mengungkap mitos yang terkandung dalam lirik lagu milik band Efek Rumah Kaca yang berjudul “Merah”, “Jingga”, dan “Kuning” dengan beberapa tahapan yaitu dengan menganalisis makna denotasi, makna konotasi, dan lalu menghasilkan mitos.

Dalam lagu milik Efek Rumah Kaca yang berjudul “Merah”, “Jingga”, dan “Kuning” tersebut terdapat representasi kritik sosial khususnya yang ada di

Indonesia mulai kritik tentang dunia politik, tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM, dan kritik tentang keberagaman. Kritik yang dilakukan lewat lirik lagu tersebut disampaikan dengan bahasa-bahasa kiasan dan tajam yang banyak mengandung simbol pada tiap kata yang diramu dalam tiap bait-baitnya.

Seperti pada lagu yang berjudul “Merah” yang merepresentasikan kritik sosial tentang dunia politik yang ada di Indonesia saat ini tidaklah beres, pada lirik tersebut dijelaskan dengan tata bahasa yang lugas bahwa perpolitikan yang ada saat ini sangatlah “busuk” dari proses awal pemungutan suara sampai elite politik tersebut benar-benar terpilih dan menjabat menjadi wakil rakyat, yang pada kenyataannya tidak seperti. Masyarakat selalu tidak memiliki akses untuk menyampaikan secara langsung aspirasi mereka, bahkan yang terjadi baru-baru ini masyarakat seakan dibungkam, dengan adanya beberapa penangkapan terhadap masyarakat yang akan menyampaikan kritiknya.

Dan pada lagu kedua yang berjudul “Jingga” ini merepresentasikan kritik sosial tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM yang terjadi di Indonesia, lebih detailnya tentang pelanggaran yang terjadi pada kurun waktu tahun 1997-1998. Pada kurun waktu tersebut 13 aktivis diculik dan dihilangkan hingga saat ini kabar mereka tidak jelas. Dan pada lirik tersebut menjelaskan bagaimana keluarga korban saat ini mencari keadilan dan pertanggungjawabannya ke pemerintah, karena memang pelanggaran HAM tersebut adalah kewajiban pemerintah untuk menengani kasusnya hingga tuntas. Namun hingga saat ini kasus tersebut tidaklah jelas ditangani atau tidak.

Lalu pada lagu terakhir yang menjadi bahan penelitian oleh penulis adalah lagu yang berjudul “Kuning”, lagu ini merepresentasikan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dijelaskan lewat lirik-lirik yang puitis sekaligus lugas bahwa saat ini di Indonesia masih banyak terjadi konflik-konflik yang berlatar belakang perbedaan, entah agama, suku, etnis dan lain sebagainya. Lalu pada akhir-akhir lirik yang tersirat tentang cita-cita dari Efek Rumah Kaca tentang perdamaian, kesatuan masyarakat Indonesia walaupun berbeda-beda latar belakangnya, seperti semboyan yang dimiliki oleh negara kita Bhinneka Tunggal Ika.

Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Dalam konteks inilah kritik sosial merupakan salah satu variabel penting dalam memelihara sistem sosial. Sebagai tindakan sosial ataupun individual yang menyimpang dari orde sosial maupun orde nilai-moral dalam masyarakat dapat dicegah dengan memfungsikan kritik sosial. Dengan kata lain, kritik sosial dalam hal ini berfungsi sebagai wahana untuk konservasi dan reproduksi sebuah sistem sosial atau masyarakat (Mahfud et al, 1997, p. 4). Jadi bagaimanapun kritik sosial itu sangat penting kegunaannya untuk keberlangsungan suatu negara kedepannya. Dan penyampaian kritik tersebut dapat dilakukan dengan media apapun menurut kemampuan sang kritikus, salah satunya dengan media lagu.